



Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak Harga Pangan *Community Coping Strategies for Facing Food Price Volatility*

Rahmat Juhandi/SMERU

DARI EDITOR FROM THE EDITOR	2
FOKUS KAJIAN FOCUS ON	3
Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak Harga Pangan <i>Community Coping Strategies for Facing Food Price Volatility</i>	
DATA BERKATA THE DATA SAYS	11
Perkembangan Proporsi Pengeluaran Konsumsi Bahan Makanan Masyarakat Indonesia: Seperti Apa Perubahan yang Terjadi? <i>Indonesia's Proportions of Food Consumption Expenditure: What the Changes Look Like</i>	
DARI LAPANGAN FROM THE FIELD	19
- Penyesuaian Tanggung Jawab dan Cara Penyediaan Makanan pada Rumah Tangga Miskin di Perkotaan <i>Adjusting Responsibilities and Ways of Preparing Food in Urban Poor Households</i>	
- Sistem Pendukung yang Dapat Dimanfaatkan Masyarakat <i>Support Systems that Are Used by the Community</i>	
- Aspirasi Anak Muda terhadap Pekerjaan di Sektor Pertanian <i>Young People's Aspirations for Working in Agriculture</i>	
OPINI OPINION	32
Membangun Ketahanan dalam Menghadapi Harga Pangan: Pelajaran yang Dipetik dari India dan Vietnam <i>Building Resilience toward Food Price Volatility: Lessons Learned from India and Vietnam</i>	
KABAR DARI LSM NEWS FROM NGOs	37
Memperkuat Sistem Pangan Masyarakat: Jalan Mencapai Kedaulatan Pangan <i>Strengthening the Community Food System: Toward Sovereignty</i>	

Harga pangan global telah meningkat tajam secara substansial dan tak terduga sejak 2007. Di Indonesia, perkembangan harga pangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas gejolak yang makin sering dan makin tak terduga. Selain faktor musiman seperti hari raya dan masa panen yang rutin terjadi setiap tahun, gejolak harga pangan juga didorong oleh perubahan dalam kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang secara tidak langsung memengaruhi biaya produksi dan distribusi komoditas pertanian, kebijakan perdagangan, upah minimum, dan faktor eksternal lainnya seperti harga komoditas di pasar internasional dan nilai tukar mata uang (World Bank Jakarta, 2014; Prastowo, Yanuarti, dan Depari, 2008; World Bank Jakarta, 2011).

(Bersambung ke hlm. 3)

Globally, the cost of basic food commodities has spiked substantially and unexpectedly since 2007. In Indonesia, the growth in the cost of staple foods in the last few years has demonstrated the intensity of fluctuations, which are increasingly frequent and unforeseen. Aside from seasonal factors such as national holidays and harvest periods which occur each year, food price volatility also occurs because of fuel price policies (which indirectly influence the cost of production and distribution of commodities), trade policies, minimum wages, and other external factors such as global commodity prices and currency values (World Bank Jakarta, 2014; Prastowo, Yanuarti, and Depari, 2008; World Bank Jakarta, 2011).

(Continued on page 3)



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, perbaikan sektor sosial, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kajian independen sebagaimana yang dilakukan oleh SMERU selama ini terus dibutuhkan.

SMERU is an independent institution for research and policy studies which professionally and proactively provides accurate and timely information as well as objective analysis on various socioeconomic and poverty issues considered most urgent and relevant for the people of Indonesia.

With the challenges facing Indonesian society in poverty reduction, social protection, improvement in social sector, development in democratization processes, and the implementation of decentralization and regional autonomy, there continues to be a pressing need for independent studies of the kind that SMERU has been providing.

DEWAN REDAKSI/EDITORIAL BOARD:

Asep Suryahadi, Widjajanti Isdijoso,
Nina Toyamah, Rachma Indah Nurbani

REDAKSI/EDITORIAL STAFF:

Editor dan Penerjemah/*Editors and Translators:*

Liza Hadiz, Gunardi Handoko, Bree Ahrens
(Australian Volunteers International), Mukti
Mulyana, Budhi Adrianto

Perancang Grafis/*Graphic Designer:*

Novita Maizir

Staff Distribusi/*Distribution Officer:*

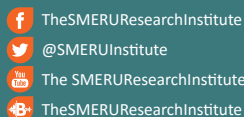
Heru Sutapa

Buletin SMERU diterbitkan untuk berbagi gagasan dan mengundang diskusi mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Temuan, pandangan, dan interpretasi yang dimuat dalam buletin SMERU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan di luar tanggung jawab SMERU atau badan penyanggah dana SMERU. Silakan mengirim komentar Anda. Jika Anda ingin terdaftar dalam mailing list kami, kunjungi situs web SMERU atau kirim surel Anda kepada kami.

The SMERU newsletter is published to share ideas and to invite discussions on social, economic, and poverty issues in Indonesia from a wide range of viewpoints. The findings, views, and interpretations published in the articles are those of the authors and should not be attributed to SMERU or any of the agencies providing financial support to SMERU. Comments are welcome. If you would like to be included on our mailing list, please visit our website or send us an e-mail.



Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330 Indonesia
Phone: +6221-3193 6336;
Fax: +6221-3193 0850
e-mail: smeru@smeru.or.id;
website: www.smeru.or.id



Pembaca yang Budiman,

Awal tahun ini The SMERU Research Institute merampungkan penelitiannya tentang gejolak harga pangan. Tujuan studi ini adalah mendokumentasikan pengalaman masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan harga pangan yang mendadak dan tidak menentu. Studi ini dilaksanakan dari 2012 hingga 2016 dengan lokasi di tiga desa di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Banjar.

Tampaknya perubahan harga pangan bukan saja memengaruhi gizi dan pola makan masyarakat. Karena strategi bertahan hidup yang harus dijalankan, gejolak harga pangan juga mengubah pola kerja dan peran anggota keluarga. Beberapa anggota keluarga harus bekerja dengan jam kerja lebih panjang dan kadang harus melakukan lebih dari satu pekerjaan. Perubahan peran ini tentunya berdampak pada kualitas pengasuhan dan perawatan anggota keluarga yang pada akhirnya juga memengaruhi asupan gizi dan pola hidup sehat keluarga.

Melalui artikel-artikel dalam buletin SMERU ini, kami menguraikan temuan-temuan di atas dengan lebih detail. Dengan demikian, kami berharap bahwa SMERU sebagai lembaga penelitian dapat menyediakan informasi berbasis riset yang dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang relevan dengan apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk mendapatkan perspektif lain, kami mengundang beberapa teman sejawat untuk membagi analisis mereka. Arran McMahon dari University College London menyarankan agar Indonesia memetik pelajaran dari pengalaman negara-negara berpendapatan menengah lainnya di Asia dalam mengatasi gejolak harga pangan. Sementara itu, Said Abdullah—sebagai representasi sektor ornop untuk isu ketahanan pangan—dalam tulisannya menawarkan alternatif solusi bagi masalah gejolak harga pangan yang kerap dihadapi Indonesia.

Masalah pangan merupakan masalah yang menyangkut kehidupan generasi masa depan. Oleh karena itu, kajian mendalam yang, di satu sisi, memahami keberagaman isu ini pada konteks lokal dan, di sisi lain, menyadari adanya kemiripan pola-pola antarnegara sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat.

Selamat membaca.

Liza Hadiz

Editor

Dear Readers,

Early this year The SMERU Research Institute completed its research on food price volatility. The objective of this research was to document the experiences of the poor in facing sudden and uncertain changes in food price. The study was conducted in three villages, each in Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, and Kabupaten Banjar, from 2012 to 2016.

It appears that changes in the prices of food affect not only people's nutritional intake and meal patterns. Coping strategies implemented to face food price volatility have caused changes in work pattern and the roles of family members. A number of family members have to work longer hours and sometimes have to work more than one job. These role changes undeniably impact the quality of care which ultimately affect a family's nutrient intake and healthy living.

Through the articles of SMERU's newsletter, we draw on the aforementioned findings in more detail. We hope that SMERU, as a research institute, can provide research-based information which can encourage policies that are relevant to what is taking place in the lives of the Indonesian people.

To obtain a different perspective, we have invited our peers to share their analyses. Arran McMahon from the University College London suggests that Indonesia draw on lessons learned from other Asia's middle-income countries' experiences with regard to overcoming the issue. Said Abdullah—representing the NGO sector on food security issues—in his article offers an alternative solution to the problem of food price volatility which Indonesia frequently faces.

Food-related problems concern the lives of the future generation. Therefore, in-depth analyses which show an understanding of the diversity of the issues at the local context on one hand, and show awareness of the similarities among countries on the other hand, are critically needed to bring about appropriate policies.

I hope you enjoy this edition.

Liza Hadiz

Editor

Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak Harga Pangan *Community Coping Strategies for Facing Food Price Volatility*

Bambang Sulaksono & Rachma Indah Nurbani



Bambang Sulaksono adalah peneliti senior The SMERU Research Institute.



Bambang Sulaksono is a senior researcher at The SMERU Research Institute.

Rachma Indah Nurbani adalah peneliti senior The SMERU Research Institute.



Rachma Indah Nurbani is a senior researcher at The SMERU Research Institute.

Arian McMahon/SMERU

Gejolak harga pangan menjadi penting untuk disoroti karena, terlepas dari keberhasilannya masuk ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah, Indonesia masih menghadapi permasalahan yang cukup serius dalam hal ketahanan pangan. Menurut Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Indonesia (Badan Ketahanan Pangan, 2009), terdapat sekitar 25 juta penduduk Indonesia yang rawan pangan. Indonesia juga menghadapi krisis gizi—beberapa indikator status gizi menunjukkan bahwa 19,6% anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami berat badan kurang (*underweight*), 21,1% anak balita mengalami kekurusan (*wasting*), dan 37,2% anak balita mengalami kekerdilan (*stunting*) (Kementerian Kesehatan, 2013). Survei Indeks Ketahanan Pangan Global (Economist Intelligence Unit, 2012) mengindikasikan bahwa permasalahan ketahanan pangan yang dihadapi Indonesia tidak serta-merta berasal dari faktor ketersediaan pangan, tetapi lebih besar bersumber dari ancaman kenaikan harga pangan, kualitas pangan yang rendah, serta investasi penelitian dan pengembangan sektor pertanian yang rendah.

Harga pangan yang terus bergejolak dan cenderung naik juga berdampak pada perkembangan tingkat kemiskinan nasional. Dengan proporsi pengeluaran makanan yang besar terhadap total pengeluaran rumah tangga, gejolak harga pangan menjadi hal yang

Food price volatility deserves attention because despite now being considered a middle-income country, Indonesia still faces quite a serious problem in terms of food security. According to the Indonesian Atlas of Food Security and Insecurity (Badan Ketahanan Pangan, 2009), around 25 million Indonesians face food insecurity. Indonesia also faces a nutrition crisis—a number of nutrition indicators suggest that 19.6% of children under the age of five are underweight, 21.1% experience wasting, and 37.2% are stunted (Kementerian Kesehatan, 2013). The Global Food Security Index Survey (Economic Intelligence Unit, 2012) indicates that the problem of food insecurity in Indonesia is not necessarily caused by food inavailability, but more by the threat of food price increases, low food quality, and low levels of investment in research and agricultural development.

Fluctuating food prices and overall price increases also have an impact on national poverty rates. With a high proportion of household expenditure used to buy food, food price fluctuation is burdensome, especially for poor and near-poor families. In 2014, approximately 50% of monthly per capita expenditure in Indonesia

sangat memberatkan, terutama bagi mereka yang berasal dari rumah tangga miskin dan hampir miskin. Pada 2014, pengeluaran makanan rata-rata per kapita di Indonesia mencapai 50% dari total pengeluaran bulanan. Di tahun yang sama, pengeluaran makanan per kapita orang-orang dari golongan pengeluaran per kapita terendah mencapai 85%, sedangkan pada golongan pengeluaran per kapita tertinggi mencapai 38% dari total pengeluaran bulanan (BPS, n.d.).¹ Dalam tinjauan kebijakan pembangunan yang dilaporkan oleh World Bank (2014) dikatakan bahwa dengan proporsi yang besar terhadap pengeluaran rumah tangga miskin, sedikit saja kenaikan harga pangan bisa membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan individu pada rumah tangga tersebut. Di antara berbagai bahan pangan, beras adalah yang paling besar pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin, mengingat konsumsinya mencapai hampir seperempat jumlah konsumsi rumah tangga miskin. Tinjauan tersebut juga memperkirakan bahwa kenaikan harga beras sebesar 10% akan menaikkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 1,3% (World Bank, 2014).

Kebijakan Pemerintah untuk Menghadapi Isu Ketahanan Pangan

Berbagai program dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi gejolak harga pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara umum. Salah satunya adalah kebijakan stabilisasi harga pangan yang meliputi, antara lain, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras/gabah, stabilisasi harga kedelai (SHK), pemantauan harga pangan pokok baik secara rutin maupun menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional hingga operasi pasar khusus. Ada pula kebijakan-kebijakan lain terkait perdagangan seperti pengaturan impor beberapa komoditas pangan. Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu upaya untuk mencapai prioritas nasional dalam meningkatkan ketahanan pangan yang meliputi peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan (RPJMN, 2010–2014). Selain program dan kebijakan terkait ketahanan pangan, berbagai skema perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah diharapkan juga dapat secara tidak langsung memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan. Di antara skema yang ada, terdapat Raskin (beras bersubsidi) yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan BLT/BLSM (sebuah skema bantuan uang tunai tanpa syarat untuk rumah tangga miskin sasaran) yang di antaranya bertujuan meredakan dampak pengurangan subsidi BBM.

Terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, gejolak harga pangan masih kerap terjadi. Kebijakan stabilisasi harga yang dijalankan oleh pemerintah dinilai masih kurang efektif karena hanya meliputi beberapa komoditas pokok, terutama beras, dan hanya mengendalikan harga dalam periode relatif singkat (Salim, 2010). Kurang efektifnya berbagai program

was allocated to food. In the same year, per capita expenditure on food among the lowest socioeconomic groups constituted 85% of total expenditure, while for the top income bracket, per capita expenditure on food was 38% (BPS, n.d.).¹ In a review of development policies by the World Bank (2014), it was reported that with a large proportion of poor households' expenditure being used for food, even a small increase in food prices can have a significant impact on the welfare of individuals in such households. Of the different food types, rice has the biggest influence on welfare levels of poor households, given that rice constitutes almost a quarter of food consumed by poor households. The study also estimated that a 10% increase in the price of rice can increase the national poverty rate by as much as 1.3% (World Bank, 2014).

Government Policies to Deal With the Issue of Food Security

A number of programs and policies have been implemented by the government to overcome food price fluctuation and to increase food security among the community in general. One example is food price stabilization policies, which include Government Purchasing Prices (HPP) for rice and unhulled rice, soybean price stabilization (SHK), monitoring of staple food prices both routinely and in the lead-up to religious and national holidays as well as special market operations. In addition to this are other trade related policies such as import regulations for a number of food commodities. The stabilization of food prices is one effort to achieve national priorities in increasing food security, including increasing availability, accessibility, and food use (RPJMN, 2010-2014). Other than programs and policies related to food security, a number of social protection schemes that have been implemented by the government are aimed at indirectly strengthening community access to food. Among these schemes, Raskin (subsidized rice), which is designed for poor households, and direct cash assistance (BLT/BLSM - a cash assistance scheme with no conditions for target households), whose aims include the minimization of the impact of decreased fuel subsidies.

Despite the policies and programs undertaken by the government, fluctuations in food prices still frequently occur. Government price stabilization policies are considered ineffective because they only include some types of food—primarily rice—and only control prices in a relatively short period (Salim, 2010). The ineffectiveness of a number of food programs and policies is a result of poorly-

¹ Pada data tersebut, BPS membagi individu ke dalam delapan golongan pengeluaran per kapita per bulan, yakni kurang dari Rp100.000; Rp100.000–Rp149.999; Rp150.000–Rp199.999; Rp200.000–Rp299.999; Rp300.000–Rp499.999; Rp500.000–Rp749.999; Rp750.000–Rp999.999; dan Rp1.000.000 ke atas.

¹ In this data, BPS divided individuals into eight categories based on per capita monthly expenditure: less than Rp. 100,000; Rp100,000–149,000; Rp150,000–199,999; Rp200,000–Rp299,999; Rp300,000–Rp499,999; Rp500,000–Rp749,999; Rp750,000–Rp999,999; and Rp1,000,000 and above.

dan kebijakan pangan tidak lepas dari berbagai kelemahan yang timbul selama pelaksanaan program distribusi yang salah sasaran akibat pendataan yang kurang baik dan koordinasi antarlembaga yang juga kurang baik (OECD, 2015; Isdijoso *et al.*, 2014).

Selain itu, indikator ketahanan pangan yang selama ini dipakai lebih banyak bertumpu pada indikator-indikator makro. Berbagai penyesuaian di tingkat individu dan rumah tangga yang sifatnya nonekonomi dan sumber dukungan yang sifatnya informal membuat dampak gejolak harga pangan di tingkat mikro terlihat tidak signifikan sehingga sering kali luput dari perhatian para pemangku kepentingan (Hossain, King, dan Kelbert, 2013).

Edisi buletin ini mengangkat beberapa temuan dari studi SMERU “Hidup di Tengah Gejolak Harga Pangan di Indonesia” yang dilakukan di tiga lokasi penelitian, yakni Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cianjur di Jawa Barat dan Kabupaten Banjar di Kalimantan Selatan.² Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui serangkaian wawancara mendalam dengan rumah tangga sampel terpilih dan informan kunci, diskusi dengan kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat, serta observasi dan pengumpulan data pendukung. Kunjungan lapangan dilakukan tiga kali, yaitu pada Juli–Oktober 2012, September–Oktober 2013, dan Agustus–September 2014.

Dampak Gejolak Harga Pangan dan Respons Rumah Tangga

Besarnya dampak perubahan harga sebuah komoditas pangan tergantung pada intensitas konsumsi masyarakat akan komoditas pangan tersebut. Dari fluktuasi harga beberapa komoditas pangan, kenaikan harga beras adalah yang paling besar dirasakan dampaknya oleh masyarakat di lokasi penelitian karena beras merupakan sumber pangan pokok masyarakat.

Kenaikan harga beras adalah yang paling besar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

The increase in the cost of rice have the greatest impact on communities.



Sallyah/SMERU

*targeted distribution program due to poor data collection and insufficient interdepartmental coordination (OECD, 2015; Isdijoso *et al.*, 2014).*

Aside from this, food security indicators that have hitherto been used tend to be macro-indicators. A number of noneconomic coping mechanisms at the individual and household level, and informal sources of support, can make the household-level impact of food price fluctuations seem insignificant to the point that such impacts often evade the attention of stakeholders (Hossain, King, and Kelbert, 2013).

This newsletter edition reports on a number of findings from the SMERU study Life in a Time of Food Price Volatility, which was conducted at three research sites: Kabutpaten Bekasi and Kabutpaten Cianjur in West Java, and Kabupaten Banjar in South Kalimantan.² Qualitative data collection was undertaken using in-depth interviews with sample households and key informants, discussions with community groups and local figures, and observations and supporting data. Field studies were conducted three times, during July–October 2012, September–October 2013, and August–September 2014.

Effect of Food Price Fluctuation and Household Responses

The magnitude of the effect of commodity price changes depends on the extent of the commodity's consumption in the community. Of the price fluctuations of a number of different types of food, it is increases in the cost of rice that have the greatest impact on communities in the study areas because it is the staple food of the people.

² “Life in a Time of Food Price Volatility” (LITFPV) merupakan proyek penelitian global yang dilakukan oleh Institute of Development Studies (IDS) dan Oxfam GB—didanai oleh UK Aid dan Irlandia Aid. Penelitian dilakukan di sepuluh negara, yaitu Bangladesh, Burkina Faso, Bolivia, Ethiopia, Guatemala, Indonesia, Kenya, Pakistan, Vietnam, dan Zambia dalam periode empat tahun (2012–2015). Di Indonesia, penelitian LITFPV (Hidup di Tengah Gejolak Harga Pangan) dilaksanakan oleh The SMERU Research Institute.

² “Life in a Time of Food Price Volatility” (LITFPV) is a global research project conducted by the Institute of Development Studies (IDS) and Oxfam GB with funding from UK Aid and Ireland Aid. The research is conducted in ten countries: Bangladesh, Burkina Faso, Bolivia, Ethiopia, Guatemala, Indonesia, Kenya, Pakistan, Vietnam, and Zambia for a period of four-years (2012–2015). In Indonesia, the LITFPV research is conducted by The SMERU Research Institute.

Selain beras, beberapa bahan pangan lain yang dampak perubahan harganya dirasakan masyarakat di tiga lokasi penelitian adalah cabai, bawang merah, ikan asin, dan tempe. Bahan-bahan pangan tersebut banyak dikonsumsi dan mengalami gejolak harga yang relatif tinggi. Bahan makanan sumber protein hewani seperti daging ayam, sapi, dan ikan segar, walaupun mengalami gejolak harga, dampaknya relatif kurang dirasakan rumah tangga miskin di lokasi penelitian karena jarang dikonsumsi dan dianggap bahan pangan mewah. Untuk menyaingi harga yang meningkat, para penjual mengurangi ukuran bahan pangan (misalnya, menjual tempe dalam ukuran yang lebih kecil sehingga konsumen dapat membelinya dengan harga yang sama seperti sebelum kenaikan) atau menjualnya berupa paket (misalnya, paket sambal yang terdiri atas cabai, tomat, terasi).

Harga pangan yang bergejolak dan cenderung naik serta penghasilan yang makin tidak menentu mendorong rumah tangga miskin untuk melakukan penyesuaian pengeluaran. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengatur pengeluaran untuk makanan yang merupakan kebutuhan pokok sekaligus komponen terbesar pengeluaran rumah tangga. Beberapa langkah penyesuaian yang dilakukan rumah tangga adalah, antara lain, membeli bahan pangan yang lebih murah dan lebih rendah kualitasnya, mengonsumsi lebih banyak makanan instan (misalnya bumbu instan, MSG, dan mi instan) yang dianggap bisa menghemat bumbu masak, mengurangi variasi pangan, dan mengganti cara memasak dengan yang lebih murah (menggunakan kayu bakar). Beberapa rumah tangga yang tinggal di perdesaan berupaya menghemat dengan mencari bahan pangan di sekitar rumah, seperti memetik sayuran di kebun, memancing ikan di sungai, dan memungut beras sisa panen.

Harga pangan yang makin meningkat juga mendorong beberapa rumah tangga untuk lebih memilih membeli lauk matang dari warung sekitar rumah daripada memasak sendiri. Membeli lauk matang, hingga batas tertentu, dirasa lebih murah karena mereka tidak perlu menyediakan berbagai keperluan untuk memasak (bahan mentah, bumbu, dan bahan bakar). Dengan jumlah uang yang sama, bisa didapatkan lauk yang lebih beragam, di samping juga menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu memasak.

Hal ini terutama berlaku pada ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan bernilai ekonomi—baik di dalam maupun di luar rumah. Kegiatan memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya secara tradisional dilakukan oleh ibu, tetapi dengan makin banyaknya ibu-ibu yang juga melakukan pekerjaan bernilai ekonomi untuk menambah penghasilan rumah tangga, beberapa rumah tangga harus melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan dengan, antara lain, mengalihkan pekerjaan tersebut kepada anggota rumah tangga lain (biasanya perempuan juga) atau memenuhi kebutuhan dengan membeli atau membayar (membeli makanan atau air isi ulang dan menyewa jasa penatu untuk mencuci pakaian). Pada banyak kasus, pemenuhan kebutuhan tersebut masih menjadi tanggung jawab ibu rumah tangga sehingga mereka menanggung beban ganda.

Aside from rice, volatility in the prices of a number of other foods also impact the communities of the three research sites: chilis, red shallots, salted fish, and tempeh. These goods are consumed in large volumes and experience relatively high levels of price fluctuation. Animal sources of protein like chicken, beef, and fresh fish, while experiencing price volatility, have less of an impact on the poor community because they are rarely consumed in the study area and are considered to be luxury foods. To get around price increases, sellers reduce the standard portion size of food sold (for example, selling smaller packages of tempeh for the same price as before) or sell food as a pack (for example, as a sambal pack containing chili, tomato, and fish paste).

Food prices that fluctuate and experience overall increases, together with unstable incomes, push households to make adjustments to their expenditure. The biggest challenge faced is in managing food expenditure, which is both a basic necessity and the biggest expenditure for a household. A number of adaptive steps taken by households are, among others, buying food items that are cheaper and lower in quality, consuming more instant foods (such as instant spices, MSG, and instant noodles) which are seen as ways of saving money on cooking spices, reducing food variation, and replacing current cooking methods with cheaper options (such as cooking on a wood fire). A number of households who live in rural areas try to economize by looking for sources of food around their home, such as picking vegetables from the garden, fishing in the river, and picking the remnants of the rice harvest.

Increases in food prices also push some households to choose to buy prepared food from stalls near their home rather than cooking themselves. Buying prepared foods, to a certain extent, is considered cheaper because there is no need to prepare cooking necessities (raw ingredients, spices, and cooking fuel). With the same amount of money, they can get a variety of prepared foods, while also saving time and energy because they don't need to cook.

This primarily works for women who engage in paid economic activities within or outside of the household. Cooking and other housekeeping tasks are traditionally done by mothers, but with increasing numbers of mothers now engaging in paid work to contribute to household income, some households have to make adjustments. This is done by, among other things, reallocating these tasks to other family members (usually also a female household member) or fulfilling needs by buying goods or services (buying prepared food or refillable water gallons, and hiring someone to do laundry). In many cases, fulfilment of these needs remains the responsibility of the wife of the household, which leaves them with a double burden.

Untuk menyasiasi harga yang meningkat, para penjual mengurangi ukuran bahan pangan yang dijual.

To get around price increases, sellers reduce the standard portion size of food sold.



Arran McMahon/SMERU

Kondisi Ekonomi Lokal dan Perubahan Biaya Hidup

Tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama rumah tangga miskin, tidak hanya gejala harga pangan, tetapi juga gejala harga kebutuhan hidup lainnya serta penghasilan rumah tangga yang tidak menentu. Seperti diungkapkan oleh masyarakat di tiga lokasi penelitian, perubahan harga tidak hanya terjadi pada makanan, tetapi juga kebutuhan hidup lain seperti ongkos transportasi. Biaya hidup yang makin mahal tidak sejalan dengan kondisi penghidupan yang makin menurun, terutama pada usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Mahalnya biaya produksi dan harga komoditas yang merugikan membuat produktivitas kedua sektor tersebut makin terpuruk. Hal ini terjadi di Banjar; industri perkebunan karet rakyat di daerah ini sedang mengalami keterpurukan akibat harga dan produksi karet yang menurun. Harga menjadi turun karena kemarau panjang dan kondisi pohon karet yang sudah tua serta kurang terawat. Pada saat bersamaan, harga sarana produksi perkebunan karet makin meningkat, bahkan susah didapat.

Di Cianjur dan Bekasi, walaupun kondisi ekonomi lokal menunjukkan peningkatan, pasang surut tetap dirasakan di tingkat individu dan rumah tangga. Di Cianjur, selain ada rumah tangga yang mengalami peningkatan kesejahteraan, ada pula rumah tangga yang mengalami penurunan sumber penghidupan. Hal ini terutama terjadi pada rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada pertanian. Kenaikan upah buruh tani mendorong sebagian petani pemilik dan pengelola lahan untuk lebih banyak mengerjakan sendiri lahannya. Para petani juga menghadapi kenaikan biaya produksi lainnya seperti ongkos giling padi serta harga pupuk dan obat-obatan. Selain itu, kondisi irigasi yang kurang baik, musim kemarau, dan serangan hama membuat prospek usaha pertanian makin menurun. Pada akhirnya, keadaan ini mendorong petani untuk beralih profesi ke bidang usaha lain, dan pemilik lahan mengalihfungsikan atau menjual lahannya untuk keperluan lain di luar pertanian.

Local Economic Conditions and Changes in Living Costs

Challenges faced by the community, foremost by poor families, are not only food price volatility, but also fluctuations in the price of other necessities and household incomes that are uncertain. As stated by communities in the three research locations, price changes do not only apply to foods, but also to other needs like transportation costs. An increasingly expensive cost of living is not consistent with diminished living conditions, especially in the agriculture and plantation sectors. It's the cost of production and commodity prices that disrupt the productivity of these sectors in more damaging ways. This is what took place in Banjar; the community rubber plantation industry is experiencing a decline because of falling rubber prices and production levels. Prices dropped because of a long drought and the condition of the rubber trees, which are old and not well cared for. At the same time, the cost of production needs for plantations have increased, and even become harder to access.

In Cianjur and Bekasi, although local economic conditions show signs of growth, highs and lows are still experienced at individual and household levels. In Cianjur, aside from households that experience an increase in welfare, there are also households that experienced a decline. This is primarily the case for families who rely on agriculture. Increasing wages for agricultural workers mean that land-owning farmers and farm managers are more likely to work the fields themselves. Farmers also face increasing production costs of other types, in terms of the cost of rice processing and the cost of fertilizers and soil treatments. Aside from this, insufficient irrigation, periods of drought, and pests result in declining prospects for agriculture. In the end, this situation pushes farmers to change professions, and land owners to alter their use of the land or sell lands to nonagricultural interests.

Warung di sekitar rumah menjadi sumber dukungan ketika warga kekurangan uang untuk berbelanja.

Stalls are frequent source of support when people lack money for shopping.



Nur Ain/SMERU

Naik turunnya kondisi penghidupan di Bekasi banyak dipengaruhi oleh kondisi usaha industri di sekitar lokasi. Usaha ini pun dipengaruhi faktor-faktor lain seperti permintaan pasar terhadap produk industri terkait (domestik ataupun ekspor), harga bahan baku industri, harga energi (BBM, listrik), kebijakan pengupahan, dan peraturan ketenagakerjaan.

Pasang surut usaha pertanian dan perkebunan memengaruhi minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pilihan pekerjaan. Sementara minat terhadap pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan menurun, minat terhadap pekerjaan lain di luar sektor tersebut terlihat meningkat baik di Banjar maupun Cianjur. Kecenderungan perubahan minat tersebut, selain karena prospek usaha perkebunan dan pertanian yang makin menurun, juga karena makin berkembangnya jenis usaha lain seperti pertambangan batubara di Banjar dan industri manufaktur di Cianjur.

Sumber Dukungan Masyarakat

Ketika kondisi penghidupan menurun, sementara biaya kebutuhan hidup meningkat, sumber dukungan informal yang berasal dari keluarga dan tetangga sangat penting karena mudah diakses. Seperti diungkapkan oleh masyarakat di tiga lokasi penelitian, keluarga atau tetangga biasanya menjadi orang pertama yang dimintai bantuan ketika mereka mengalami kesulitan. Selain itu, warung di sekitar rumah—yang sering kali merupakan milik tetangga ataupun keluarga—menjadi sumber dukungan yang cukup sering mereka manfaatkan ketika kekurangan uang untuk berbelanja. Sumber dukungan lain yang dirasa penting oleh masyarakat adalah “bos” (orang yang mempekerjakan), tengkulak (pengepul), dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, ada pula sumber dukungan yang berasal dari perusahaan-perusahaan sekitar dalam bentuk *corporate social responsibility* (CSR), seperti yang terjadi di Bekasi.

The rise and fall of living conditions in Bekasi are highly influenced by conditions in the industrial sector of the area. These industries are also affected by other factors such as market demand (domestic and export), the price of raw materials, the cost of energy (oil and electricity), wage policies, and industrial relations regulations.

The ups and downs of farming and plantation impact the public's level of interest in different employment options, especially the younger generation. While interest in farming and plantation work has declined, interest levels in work outside of these sectors have been seen to increase in both Banjar and Cianjur. This tendency, aside from being influenced by declining income prospects in farming and plantation work, is also due to the emergence of other types of businesses, such as coal mining in Banjar and manufacturing in Cianjur.

Sources of Support for the Community

When living conditions decline and the cost of living increases, informal supports from family and neighbors are important because they are easily accessed. As stated by the community in the three research sites, family or neighbors are usually the first people asked for help when people experience difficulty. Aside from that, stalls around the home, often owned by neighbors or family, are quite a frequent source of support when people lack money for shopping. Other sources of support considered important are employers, intermediaries (collectors), and local community figures. Aside from these, support can also be derived from local businesses through their CSR programs, as is the case in Bekasi.

Pemerintah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, tetapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya membuat pemanfaatan program tersebut oleh masyarakat menjadi kurang optimal. Di antara program pemerintah yang dirasakan bermanfaat adalah Raskin. Namun, terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas beras, jumlah, dan sistem distribusinya. Beras Raskin yang selalu tersedia setiap bulan dianggap menghemat pengeluaran rumah tangga. Untuk mengatasi kualitasnya yang kurang baik, biasanya masyarakat mencampur beras tersebut dengan beras berkualitas lebih baik.

Meskipun tidak secara langsung ditujukan untuk mengatasi gejolak harga pangan, program-program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan juga dimaksudkan untuk menyediakan layanan dasar yang terjangkau bagi masyarakat yang pada akhirnya bisa mengurangi beban biaya hidup rumah tangga miskin. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala terkait akses dan biaya (Isdijoso, et al., 2014).

Catatan Penutup

Sebagaimana diulas dalam edisi ini, strategi bertahan masyarakat dalam menghadapi gejolak harga pangan memunculkan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah untuk pengawasan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Pemerintah, melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), telah menerapkan berbagai program pengawasan, tetapi cakupannya masih sangat terbatas. Untuk itu, pemerintah perlu memperluas cakupan program yang ada dan meningkatkan kapasitas pelaksana program. Peningkatan kapasitas pelaksana program juga dibutuhkan untuk menjamin agar program-program pemerintah, baik yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan maupun program-program lainnya, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Sementara itu, menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan ketersediaan pangan di masa depan. Beberapa langkah dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan pertanian tanaman pangan, di antaranya dengan meningkatkan investasi di sektor pertanian, terutama untuk penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian secara tidak langsung akan mendorong minat generasi muda untuk kembali menggeluti usaha tersebut dan pada akhirnya akan mendukung keberlangsungan sektor pertanian dalam menjamin pasokan pangan di masa depan.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah tidak terlepas dari pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat serta organisasi nonpemerintah (ornop). Untuk itu, pemerintah perlu merumuskan mekanisme yang tepat untuk mengakomodasi peran masyarakat dan ornop. ●

The government runs a number of social protection programs for the poor, but a number of implementation problems make the benefits limited. Of the government programs, Raskin is considered successful. However, there are complaints related to rice quality, quantity, and distribution. Raskin rice that is provided each month is considered to economize household expenditure. To deal with the poor quality, people usually mix this rice with better-quality rice.

While not directly addressing food price volatility, government programs in health and education are also intended to provide basic services for people that, in the end, reduce cost of living burdens for poor households. However, in their implementation, there are obstacles in regard to access and costs (Isdijoso, et al., 2014).

Closing Remarks

As discussed in this edition, community resilience strategies in facing food price volatility create concerns about the quality and safety of food consumed by the community. Consequently, government policies that oversee quality and safety of food that circulates in the community are needed. The government, through the National Drug and Food Control Agency (Badan POM), has enacted a number of control measures, but their scope is still very limited. The government needs to extend the scope of existing programs and improve the capacity of implementers. Improving the capacity of implementers is also needed to ensure that government programs, both directly and indirectly related to food security, can be of optimal benefit to the community.

At the same time, the declining interest of the younger generation toward agriculture creates concern for the future viability of food availability. A number of steps need to be taken to ensure the future of food production, among which are increased investment in the agricultural sector, especially for research and the development of programs to add value and improve productivity. Value-adding initiatives for the agricultural sector will indirectly strengthen the interest of young people in reengaging with the sector, and eventually support the future viability of the agricultural sector in ensuring the future food supply.

Finally, the success of government program implementation is closely related to the active oversight and participation of the people and nongovernmental organizations (NGOs). For this purpose, the government needs to set appropriate mechanisms to accommodate this role for the community and NGOs. ●

Daftar Acuan

- Badan Pusat Statistik (n.d.) *Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2013–2014* [dalam jaringan] <<http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/964>> [4 Desember 2015].
- Economist Intelligence Unit (2012) *Country Summary: Indonesia (Overview of Indonesia's Performance in the Global Food Security Index)* [Ringkasan Laporan Negara: Indonesia (Tinjauan Umum terhadap Kinerja Indonesia di dalam Indeks Ketahanan Pangan Dunia)] The Economist [dalam jaringan] <http://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20GFSI%202012_Indonesia%20summary.pdf> [25 Desember 2013].
- Hossain, Naomi, Richard King, dan Alexandra W. Kelbert (2013) *Squeezed: Life in a Time of Food Price Volatility, Year 1 Results*. [Terjepit: Hidup di Masa Gejolak Harga Pangan, Hasil Tahun Pertama]. United Kingdom: Institute of Development Studies and Oxfam.
- Isdijoso, Widjajanti, Rachma Indah Nurbani, Hafiz Arfyanto, dan M. Sulton Mawardi (2014) *Tinjauan Strategis Kondisi Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Mendukung Pengurangan Stunting*. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, World Food Programme, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- Kementerian Kesehatan (2013) *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan [dalam jaringan] <<http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riskasdas%202013.pdf>> [5 Juni 2015].
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) *Achieving Greater Food Security* [Mencapai Ketahanan Pangan yang Lebih Tinggi]. Indonesia OECD Policy Brief [dalam jaringan] <<http://www.oecd.org/policy-briefs/indonesia-agriculture-improving-food-security.pdf>> [4 Desember 2015].
- Prastowo, N. Joko, Tri Yanuarti, dan Yoni Depari (2008) *Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya terhadap Inflasi*. Working Paper, Bank Indonesia [dalam jaringan] <<http://www.bi.go.id/id/publikasi/artikel-kertas-kerja/kertas-kerja/Documents/7ecb03a80f5748e5a557188ec3f47074WP200807.pdf>> [16 Desember 2015].
- Salim, Zamroni (2010) *Food Security Policies in Maritime Southeast Asia: the Case of Indonesia* [Kebijakan Ketahanan Pangan di Bahari Asia Tenggara: Kasus Indonesia]. The International Institute for Sustainable Development, Canada [dalam jaringan] <http://www.iisd.org/tkn/pdf/food_security_policies_indonesia.pdf> [4 Desember 2015].
- World Bank (2014) *Indonesia Development Policy Review 2014: Avoiding the Trap* [Tinjauan Kebijakan Pembangunan Indonesia 2014: Menghindari Jebakan]. The World Bank Office Jakarta [dalam jaringan] <<http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-english.pdf>> [31 Juli 2015].
- World Bank (2011) *Perkembangan, Pemicu, dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia*. Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan, World Bank Office Jakarta [dalam jaringan] <<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13276/588310V20WP0BA10Box358325B01Bahasa.pdf?sequence=6>> [16 Desember 2015].

List of References

- Badan Pusat Statistik (n.d.) *Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2013–2014* [Average Expenditure per Capita per Month in Urban and Rural Areas by Group of Goods and Level of Expenditure per Capita per Month, 2013–2014] [online] <<http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/964>> [4 December 2015].
- Economist Intelligence Unit (2012) *Country Summary: Indonesia (Overview of Indonesia's Performance in the Global Food Security Index)*. The Economist [online] <http://foodsecurityindex.eiu.com/Home/DownloadResource?fileName=EIU%20GFSI%202012_Indonesia%20summary.pdf> [25 December 2013].
- Hossain, Naomi, Richard King, and Alexandra W. Kelbert (2013) *Squeezed: Life in a Time of Food Price Volatility, Year 1 Results*. United Kingdom: Institute of Development Studies and Oxfam.
- Isdijoso, Widjajanti, Rachma Indah Nurbani, Hafiz Arfyanto, and M. Sulton Mawardi (2014) *Tinjauan Strategis Kondisi Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Mendukung Pengurangan Stunting* [Strategic Review of the Condition of Food Security and Nutrition in Indonesia: Increase Food Security to Support the Reduction of Stunting]. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, World Food Programme, and Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- Kementerian Kesehatan (2013) *Riset Kesehatan Dasar 2013* [Basic Health Research 2013]. Jakarta: Kementerian Kesehatan [online] <<http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riskasdas%202013.pdf>> [5 June 2015].
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2015) *Achieving Greater Food Security*. Indonesia OECD Policy Brief [online] <<http://www.oecd.org/policy-briefs/indonesia-agriculture-improving-food-security.pdf>> [4 December 2015].
- Prastowo, N. Joko, Tri Yanuarti, and Yoni Depari (2008) *Pengaruh Distribusi dalam Pembentukan Harga Komoditas dan Implikasinya terhadap Inflasi* [The Effect of Distribution in Establishing the Price of Commodities and Its Implication on Inflation]. Working Paper, Bank Indonesia [online] <<http://www.bi.go.id/id/publikasi/artikel-kertas-kerja/kertas-kerja/Documents/7ecb03a80f5748e5a557188ec3f47074WP200807.pdf>> [16 December 2015].
- Salim, Zamroni (2010) *Food Security Policies in Maritime Southeast Asia: the Case of Indonesia*. The International Institute for Sustainable Development, Canada. [online] <http://www.iisd.org/tkn/pdf/food_security_policies_indonesia.pdf> [4 December 2015].
- World Bank (2014) *Indonesia Development Policy Review 2014: Avoiding the Trap*. The World Bank Office Jakarta [online] <<http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/Indonesia-development-policy-review-2014-english.pdf>> [31 July 2015].
- World Bank (2011) *Perkembangan, Pemicu, dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia* [The Development, Trigger, and Impact of Commodity Price: Its Implication toward the Indonesian Economy]. Laporan Pengembangan Sektor Perdagangan, World Bank Office Jakarta [online] <<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13276/588310V20WP0BA10Box358325B01Bahasa.pdf?sequence=6>> [16 December 2015].

Perkembangan Proporsi Pengeluaran Konsumsi Bahan Makanan Masyarakat Indonesia: Seperti Apa Perubahan yang Terjadi?

Indonesia's Proportions of Food Consumption Expenditure: What the Changes Look Like

Rachma Indah Nurbani & Nina Toyamah

Rachma Indah Nurbani adalah peneliti senior The SMERU Research Institute.



Rachma Indah Nurbani is a senior researcher at The SMERU Research Institute.

Nina Toyamah adalah peneliti senior The SMERU Research Institute.



Nina Toyamah is a senior researcher at The SMERU Research Institute.



Selama dekade terakhir ini kita menyaksikan bagaimana pola konsumsi dan preferensi masyarakat dalam hal makanan berubah seiring meningkatnya kesejahteraan nasional. Tinjauan Bank Dunia memperlihatkan terus meningkatnya pendapatan bruto per kapita Indonesia, yakni dari 560 dolar Amerika pada 2000 menjadi 3.374 dolar pada 2015. Upaya penurunan angka kemiskinan juga memperlihatkan capaian signifikan: tingkat kemiskinan menurun dari 24% pada saat krisis keuangan Asia (1997–1998) menjadi 11% pada 2014 (World Bank Group, 2015).

Pada saat yang bersamaan dengan perbaikan kondisi ekonomi makro tersebut, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang ditandai dengan makin kecilnya proporsi pengeluaran makanan rata-rata rumah tangga Indonesia. Pada 1999, proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan mencapai 63% dan nonmakanan 37%. Sementara itu, pada 2014 proporsi pengeluaran konsumsi makanan berkurang menjadi sekitar 50%, hampir sama dengan nonmakanan (BPS, 2016).

During the last decade we have observed how community food consumption patterns and preference have changed in line with the increase of the national welfare. The World Bank review has shown continuous increase of Indonesia's national gross per capita income, i.e., from US\$ 560.00 in 2000 to US\$3,374.00 in 2015. The efforts to reduce poverty have also shown a significant achievement: poverty level had declined from 24% during the Asian financial crisis (1997–1998) to 11% in 2014 (World Bank Group, 2015).

During this period of macroeconomic improvement, there were changes in community consumption patterns, which were marked by the decreasing proportion of food expenditure in the average Indonesian household. In 1999, the proportion of food consumption has reached 63% and 37% for nonfood consumption. Meanwhile, in 2014, proportion of food consumption has decreased to about 50%; almost reaching the same level as nonfood expenditure (BPS, 2016).

Hipotesis terkait hal ini dipelopori ahli statistik berkebangsaan Jerman, Ernst Engel (1821–1896) dengan Hukum Engel-nya yang mengatakan bahwa makin tinggi kemampuan ekonomi, makin kecil proporsi pendapatan rumah tangga yang dikeluarkan untuk makanan, dan sebaliknya (Engel dalam Chai dan Moneta, 2010). Selain itu, banyak pihak percaya bahwa makin tinggi kemampuan ekonomi rumah tangga, maka makin besar perhatian terhadap kualitas pangan yang dikonsumsi. Namun, pertanyaannya adalah, apakah perbaikan kesejahteraan di Indonesia telah mendorong terwujudnya pola makan masyarakat yang lebih baik. Hingga kini belum ada perbaikan berarti pada indikator gizi dan keragaman konsumsi pangan masyarakat. Bahkan, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan beban gizi terbesar di dunia (UNICEF, 2013).

Untuk memperbarui wawasan kita tentang kondisi terkini konsumsi pangan masyarakat, artikel ini membahas perkembangan proporsi pengeluaran berdasarkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga terkini. Data tersebut dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai konsumsi makanan yang meliputi indikator kuantitas diet, kualitas diet, dan kerentanan ekonomi (Smith dan Subandoro, 2007; ISM dan SINFONICA, 2014).

Berkurangnya Proporsi Relatif Pengeluaran untuk Makanan terhadap Pengeluaran untuk Barang Bukan Makanan

Grafik 1 memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia (yang ditunjukkan oleh pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga) yang terus meningkat dalam 14 tahun terakhir. Pada saat yang sama, proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan menunjukkan pergerakan negatif, dan sebaliknya untuk nonmakanan menunjukkan pergerakan positif. Namun, pergerakan perubahan proporsi konsumsi keduanya mengalami perlambatan dan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Pergeseran proporsi pengeluaran konsumsi kedua kelompok barang tersebut (makanan dan nonmakanan) dialami oleh semua rumah tangga dari golongan kesejahteraan yang berbeda dan berlangsung

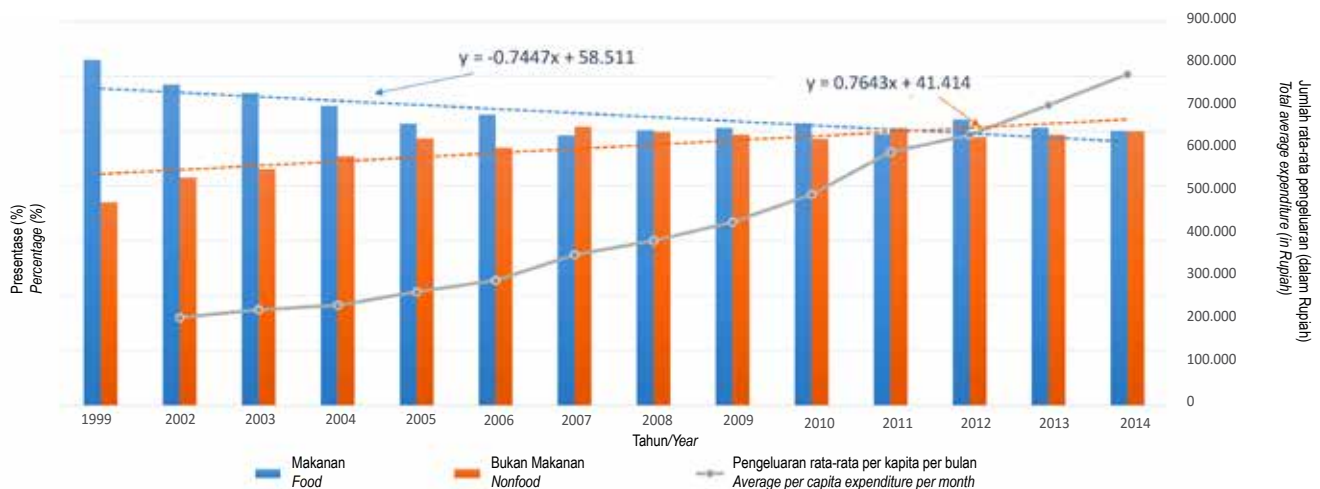
A hypothesis related to this issue was pioneered by a German statistician, Ernst Engel (1821–1896), with the Engel's law which confirmed that the higher the economic capacity, the smaller the household income spent for food, and vice versa (Engel in Chai and Moneta, 2010). In addition, there are many experts who believe that with higher household economic capacity, greater attention will be given to the quality of the food consumed. However, the question is, has welfare improvement in Indonesia encourage better community food consumption patterns? Up to the present, there is no significant improvement in nutrition indicators and the variety of food consumption of the community. Indonesia is even considered as one of the countries which holds the heaviest burden in the world in regards to nutritional problems (UNICEF, 2013).

To bring new insight on the current condition of community food consumption, this article discusses the development of food expenditure proportion based on recent data regarding household consumption expenditure. Data has been collected through the National Socioeconomic Survey (Susenas), which included questions on food consumption practices that covered the quality and quantity of diet and economic vulnerability indicators (Smith and Subandoro, 2007; ISM and SINFONICA, 2014).

The Decline of Relative Proportion of Expenditure on Food against Expenditure on Nonfood Items

Graphic 1 shows Indonesia's welfare level (reflected by the average household consumption expenditure) that continuously increased in the last 14 years. In the same period, proportion of food consumption expenditure has shown movements to a negative direction, and on the contrary, nonfood consumption expenditure revealed a positive course. However, the changes of the movements of both consumption proportions are experiencing a slower movement and tend to be stagnant in the last few years.

The shifts in the proportion of consumption expenditure of both types of goods (food and nonfood) was experienced by every



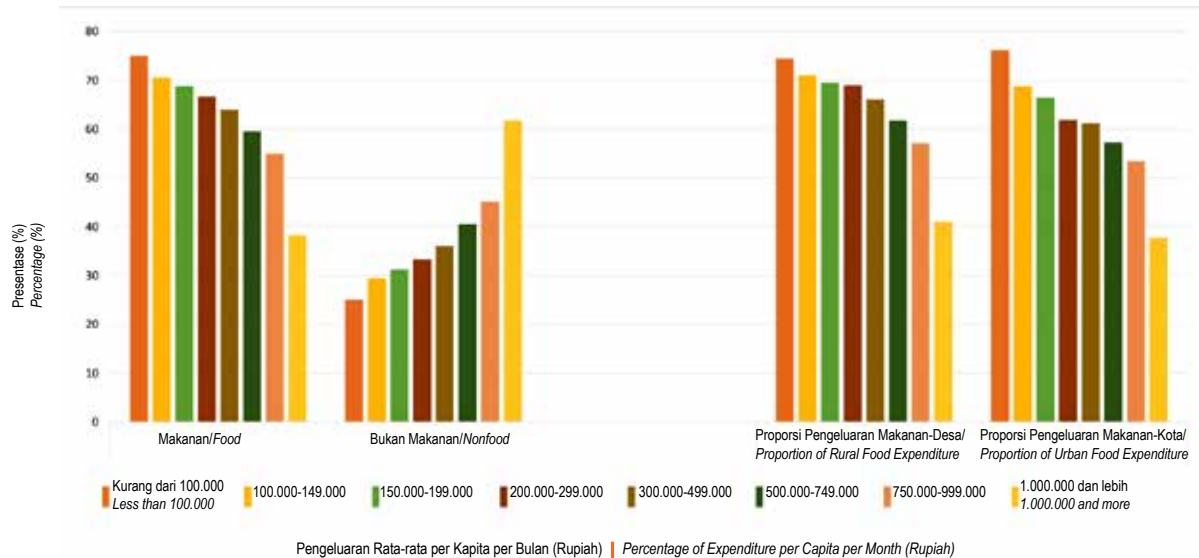
Grafik 1. Proporsi pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan rata-rata per kapita sebulan, 1999–2014 | Graphic 1. Proportion of food and nonfood expenditures on average per capita per month 1999–2014.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.

Note: This table uses Indonesian numbering conventions.

baik di perkotaan maupun perdesaan, seperti terlihat pada Grafik 2. Meskipun demikian, grafik yang sama juga menunjukkan bahwa secara umum, proporsi pengeluaran makanan rumah tangga di perdesaan masih relatif lebih besar daripada proporsi di perkotaan, kecuali untuk golongan kesejahteraan paling rendah—untuk golongan ini, di perkotaan relatif lebih besar.

household of the different welfare group levels and occurred both in urban and rural areas, as shown on Graphic 2. However, the same graphic also reveals that generally, the proportion of food expenditure in rural households is relatively higher than in urban households, except for the lowest welfare level, where in this group, urban households' proportion is higher.



Grafik 2. Proporsi pengeluaran makanan dan bukan makanan menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan dan proporsi pengeluaran makanan menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan di desa dan di kota, 2013 | Graphic 2. Proportion for food and nonfood expenditures according to expenditure level per capita per month, and proportion for food expenditure according to expenditure level per capita per month in rural and urban areas, 2013.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.

Note: This table uses Indonesian numbering conventions.

Perubahan Pola Makan Masyarakat Akhir-akhir Ini

Data proporsi pengeluaran konsumsi makanan rumah tangga Susenas memperlihatkan perkembangan perubahan pola makan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu. Grafik 3 memperlihatkan perkembangan persentase pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan untuk setiap jenis makanan mulai 1999 hingga 2014.

Walau persentasenya terus menurun, kelompok padi-padian masih menempati alokasi terbesar pengeluaran konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia. Proporsi pengeluaran konsumsi kelompok padi-padian menurun dari sekitar 27% pada 1999 menjadi hanya sekitar 16% pada 2014. Kelompok pengeluaran konsumsi terbesar berikutnya adalah untuk ikan dan sayur-sayuran yang persentase pengeluarannya berfluktuasi 8%–10%, dengan kecenderungan yang makin menurun.

Kelompok jenis makanan lain yang persentase konsumsinya juga cenderung menurun adalah daging, kacang-kacangan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, dan komoditas konsumsi lainnya. Proporsi pengeluaran untuk konsumsi umbi-

Recent Changes in Community Meal Pattern

Susenas data on the proportion of household food consumption expenditure reveals that there is a change in the meal pattern of the Indonesian community from time to time.¹ Graphic 3 illustrates the changes in the percentage of average consumption expenditure per capita per month for each type of food starting from 1999 to 2014.

Although the percentage continuously declined, the grains (paddy rice) group still constitute the largest allocation of the average consumption of Indonesian community. Proportion of consumption expenditures for grains (paddy rice) declined from about 27% in 1999 to only about 16% in 2014. The next largest consumption expenditure is for fish and vegetables in which the percentage of expenditure has fluctuated from 8% to 10%, with the tendency to decline.

Other group of foods which percentage of consumption tends to decrease are meat, beans, cooking oil and fat, beverages, spices and other consumption commodities. Proportion of expenditure

¹ Dalam kuesioner modul konsumsi dan pengeluaran Susenas, jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dibedakan atas kelompok padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, dan komoditas konsumsi lainnya. Selain itu, jenis makanan yang biasa dikonsumsi dibedakan pula atas makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih.

¹ In the questionnaire of Susenas consumption and expenditure modules, types of foods usually consumed by the Indonesian community are divided into groups of grains, tubers, fish, meat, eggs and milk, vegetables, beans, fruits, cooking oil and fat, beverages, spices, and other consumption commodities. In addition, types of foods that are usually consumed are also differentiated according to prepared food and beverages, and tobacco and betel.

umbian—yang merupakan sumber karbohidrat dari pangan lokal—juga terus menurun, dengan proporsi kurang dari 1,2%. Sebaliknya, jenis makanan yang persentase pengeluarannya relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat adalah telur, susu, dan buah-buahan. Sementara itu, pengeluaran konsumsi untuk tembakau dan sirih juga berfluktuasi, tetapi cenderung meningkat mulai 2012. Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi terus meningkat, yakni dari 15% menjadi 27%.

Dari uraian di atas, meskipun konsumsi beras dan jenis makanan pokok lainnya menunjukkan kecenderungan penurunan, sebagian ahli melihat bahwa perubahannya relatif kurang elastis bila dibandingkan dengan jenis makanan lain seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan produk susu. Hal ini berarti bahwa beras masih dianggap sebagai makanan pokok bagi semua yang konsumsinya tidak mudah dipengaruhi oleh pendapatan yang naik ataupun turun (Pangaribowo, 2011). Atas dasar ini pula sebagian masyarakat justru akan lebih mudah beralih ke—atau meningkatkan konsumsi mereka dalam hal—makanan yang bernilai gizi lebih tinggi (seperti daging dan susu) ketika pendapatannya naik (Regmi, et al., 2001).

Hal lain yang menjadi catatan, perubahan proporsi konsumsi bahan makanan belum tentu mengarah pada diversifikasi pangan. Badan Ketahanan Pangan (2012) menegaskan bahwa pangsa sumber karbohidrat nonberas yang berasal dari umbi-umbian dan jagung dalam pola konsumsi pangan pokok hampir tidak ada, malahan penurunan pangsa padi-padian (beras) digantikan oleh konsumsi terigu (yang merupakan komoditas impor) yang konsumsinya meningkat 500% menjadi 10,92 kg/kapita/tahun (dalam kurun waktu 30 tahun).

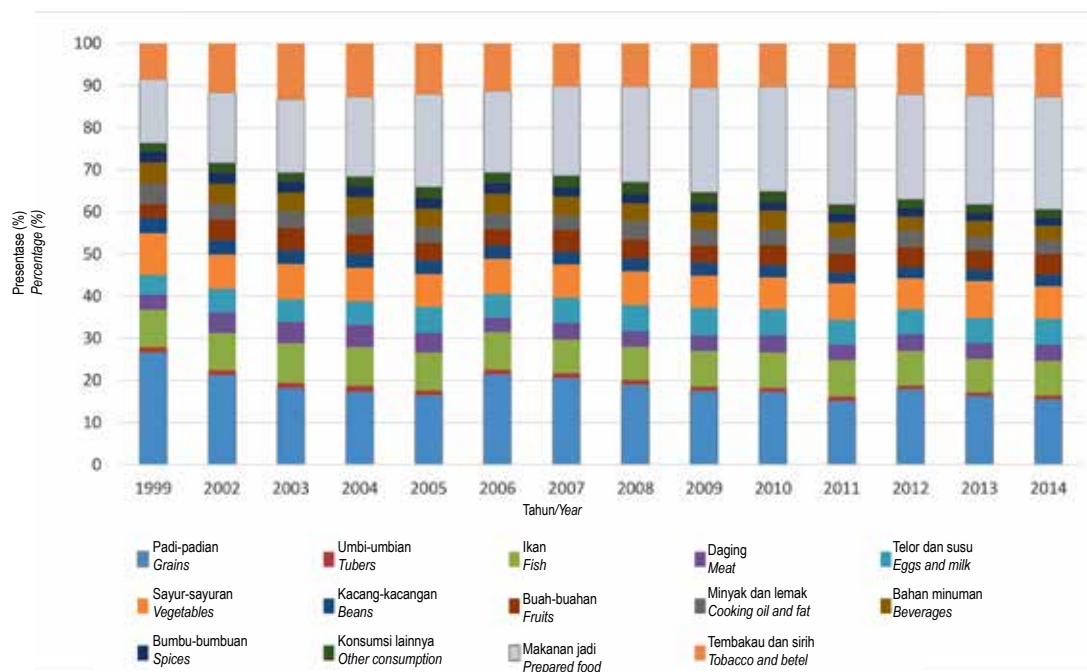
Grafik 4 memperlihatkan pergeseran proporsi pengeluaran konsumsi makanan berdasarkan kelompok kesejahteraan masyarakat (yang diwakili oleh data pengeluaran rumah tangga) pada 2014.

for tubers—which is a source for carbohydrate in local food consumption—is also declining, with a proportion of less than 1.2%. On the other hand, types of food in which the percentage of consumption expenditure is relatively stable with a slight tendency to increase is eggs, milk, and fruits. Meanwhile, consumption expenditure for tobacco and betel has also fluctuated but has tended to increase since 2012. Expenditures for prepared food and beverages have continuously increased, from 15% to 27%.

From the above explanation, although consumption of rice and other staple foods revealed a tendency to decrease, some experts viewed that the change is less elastic if compared with other type of foods, such as meat, vegetables, fruits, and milk products. This means that rice is considered as staple food for those who consumed it, and it is not easily influenced by the increase and decrease of income (Pangaribowo, 2011). Based on this fact, a portion of the community will even easily shift to or increase their consumption to higher nutritious food (such as meat and milk) when their income increases (Regmi, et al., 2001).

Another thing that has been noted, the changing in consumption proportion of food will not automatically shift to food diversification. The Food Resilience Agency (Badan Ketahanan Pangan, 2012) stated that segment of carbohydrate source of nongrains (paddy rice) originating from tubers and corn in staple food consumption pattern is almost nonexistent; furthermore, the decline of grains (paddy rice) segment has even been replaced by wheat flour (an imported commodity) which consumption has increased 500%, that is 10.92 kg/capita/year (in the period of 30 years).

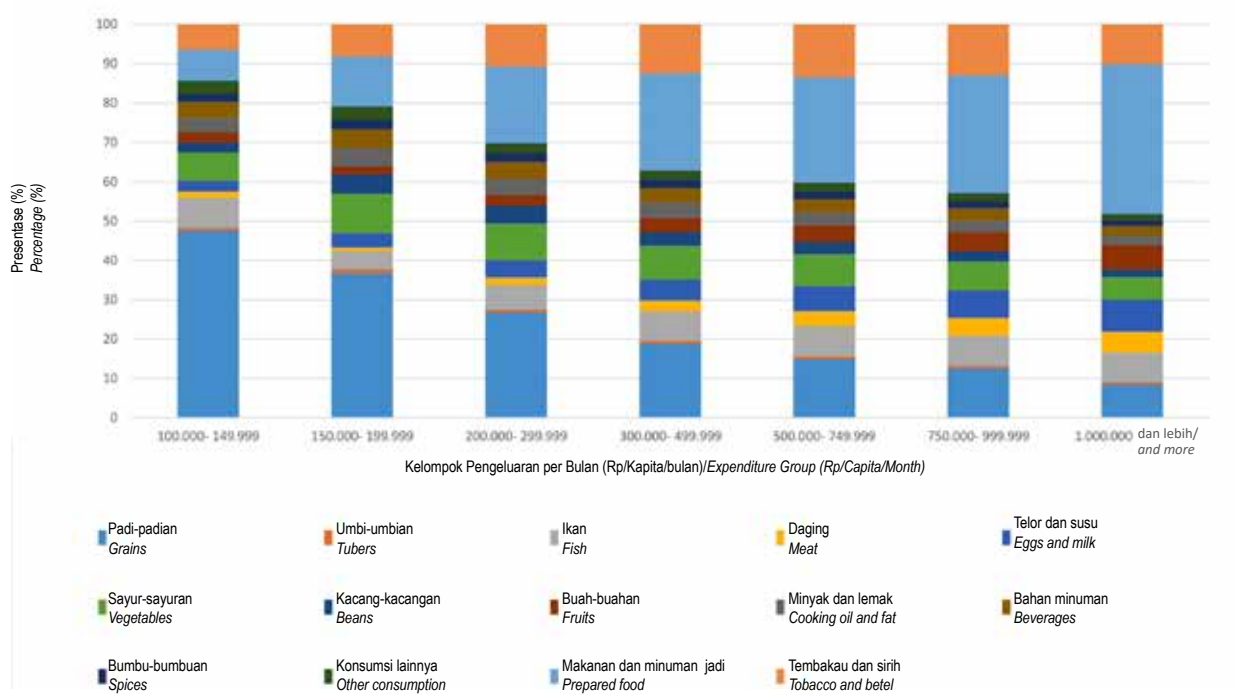
Graphic 4 shows the shifts in the proportion of food consumption expenditure based on community welfare groups (represented by data on household expenditures) in 2013. Expenditure for



Grafik 3. Persentase pengeluaran rata-rata/kapita/bulan bahan makanan, 1999–2014 | Graphic 3. Percentage of average/capita/month expenditure for food, 1999–2014.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.

Note: This table uses Indonesian numbering conventions.



Grafik 4. Persentase pengeluaran rata-rata/kapita/bulan bahan makanan berdasarkan kelompok pengeluaran, 2014 |
Graphic 4. Percentage of average/capita/month expenditure for food items based on expenditure group, 2014.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.

Note: This table uses Indonesian numbering conventions.

Pengeluaran konsumsi padi-padian makin berkurang seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yaitu dari 48% menjadi hanya 9%. Sebaliknya, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi meningkat dari sekitar 8% menjadi 38%. Persentase pengeluaran konsumsi untuk berbagai jenis makanan sumber protein seperti ikan, daging, telur, susu, minyak dan lemak, serta buah-buahan meningkat seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, untuk pengeluaran konsumsi umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, bahan minuman, bumbu-bumbuan, dan komoditas konsumsi lainnya cenderung turun seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini jelas memperlihatkan adanya ketergantungan yang makin besar terhadap produk makanan dan minuman jadi, terutama pada masyarakat yang lebih sejahtera. Proporsi pengeluaran konsumsi untuk tembakau dan sirih mengalami peningkatan cukup signifikan seiring makin sejahteranya seseorang. Namun, untuk kelompok pengeluaran tertinggi, konsumsinya lebih rendah daripada konsumsi pada kelompok pengeluaran menengah.

Pengeluaran konsumsi makanan dan minuman jadi makin tinggi seiring meningkatnya golongan pengeluaran, dengan kecenderungan lebih tinggi di perkotaan (Grafik 5). Pada 2013 pengeluaran rata-rata konsumsi makanan dan minuman jadi per kapita sebulan di perdesaan adalah 18%, sedangkan di perkotaan 32%.

Peningkatan pengeluaran makanan yang dibeli di luar rumah (makanan jadi), terutama pada rumah tangga kelompok kesejahteraan atas, merupakan fenomena yang kini banyak terjadi di dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju. Seperti ditunjukkan oleh sebuah penelitian di Amerika Serikat yang

rice consumption has been rapidly declining in line with the increase in the welfare of the community, which is from 48% to only 9%. Reversely, expenditures of prepared food and beverage consumption increased from about 8% to 38%. Percentage of consumption expenditure for various protein-source foods, such as fish, meat, eggs, milk, cooking oil and fat, as well as fruits, has increased in line with the increase of community welfare.

In the meantime, expenditures for consumption of tubers, vegetables, beans, beverages, spices, and other consumption commodities tend to decline in line with the increase of community welfare. This condition clearly reflects a greater dependency toward prepared foods and beverages, especially among communities with a better welfare condition. Proportion of consumption expenditure for tobacco and betel has increased significantly in line with better welfare. However, for the highest level expenditure group, this consumption is lower than the middle expenditure group.

Expenditure for prepared foods and beverages became higher concurrently with the increase of expenditure group level, with a higher tendency in urban areas (Graphic 5). In 2013, the average expenditure for prepared food and beverages per capita per month in rural areas was 18%, while in urban areas it was 32%

Increase of expenditure for prepared food bought outside one's home, especially among the high welfare group, is a current phenomenon found all over the world, both in developing countries and developed countries. This is revealed by a survey in the United States, where sample households with 4 people from

mengambil sampel rumah tangga beranggotakan 4 orang dari berbagai kelompok kesejahteraan, terjadi peningkatan proporsi pengeluaran makanan jadi sebanyak 26% di kalangan rumah tangga berpendapatan terendah dan 47% di kalangan rumah tangga berpendapatan tertinggi (Frazao *et al.*, 2007). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa hal ini didorong oleh, antara lain, preferensi orang dalam memilih makanan yang sering dipengaruhi pertimbangan kualitas, kenyamanan atau kepraktisan, keragaman pilihan, dan rasa yang enak (Frazao *et al.*, 2007; Nurbani, 2015).

Implikasi terhadap Pemenuhan Gizi

Kualitas pangan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan guna menjamin ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi untuk dapat hidup sehat (World Bank, 2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2013 menetapkan bahwa rata-rata kecukupan energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing adalah 2.150 kilokalori dan 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi. Namun, fakta menunjukkan bahwa nutrisi makanan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia pada umumnya belum menunjukkan perbaikan, bahkan cenderung memburuk.

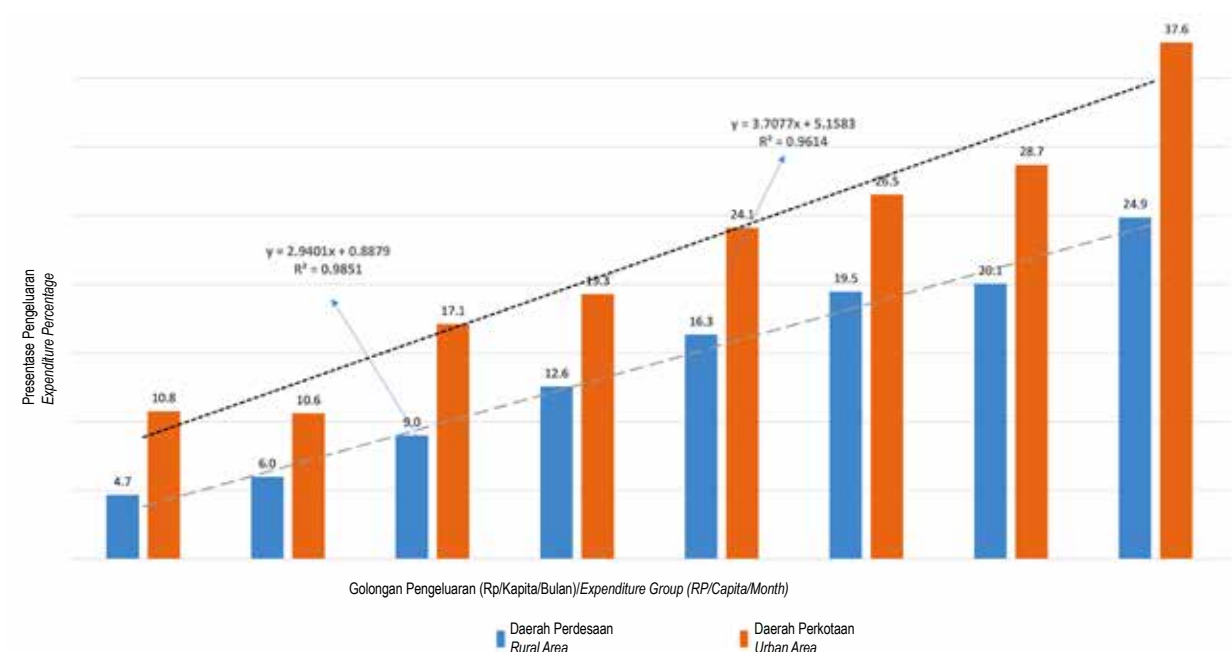
Seperti terlihat pada Grafik 6, rata-rata kecukupan energi masyarakat Indonesia pada 2014 berada di bawah standar yang ditetapkan, yakni hanya sekitar 1.850 kilo kalori. Sementara itu, rata-rata kecukupan protein sudah di atas standar yang ditetapkan, tetapi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hasil studi kuantitatif SMERU (Kusumawardhani *et al.*, 2016) menguatkan adanya fenomena ini, yaitu bahwa akibat kenaikan harga BBM, masyarakat (miskin) mengurangi kuantitas dan kualitas bahan makanan yang dikonsumsinya. Selain itu, sekitar 15%–20% masyarakat (miskin) mengurangi konsumsi proteinnya.

various welfare groups, showed an increase in the proportion of expenditure for prepared food as much as 26% among the lowest income households and 47% among households with the highest income level (Frazao et al., 2007). Various studies also show that this situation was pushed, among other things, by people's food preference which was influenced by the following considerations: quality, comfort or practicality, variety of choices, and delicious taste (Frazao et al., 2007; Nurbani, 2015).

Implication on Nutrition Fulfillment

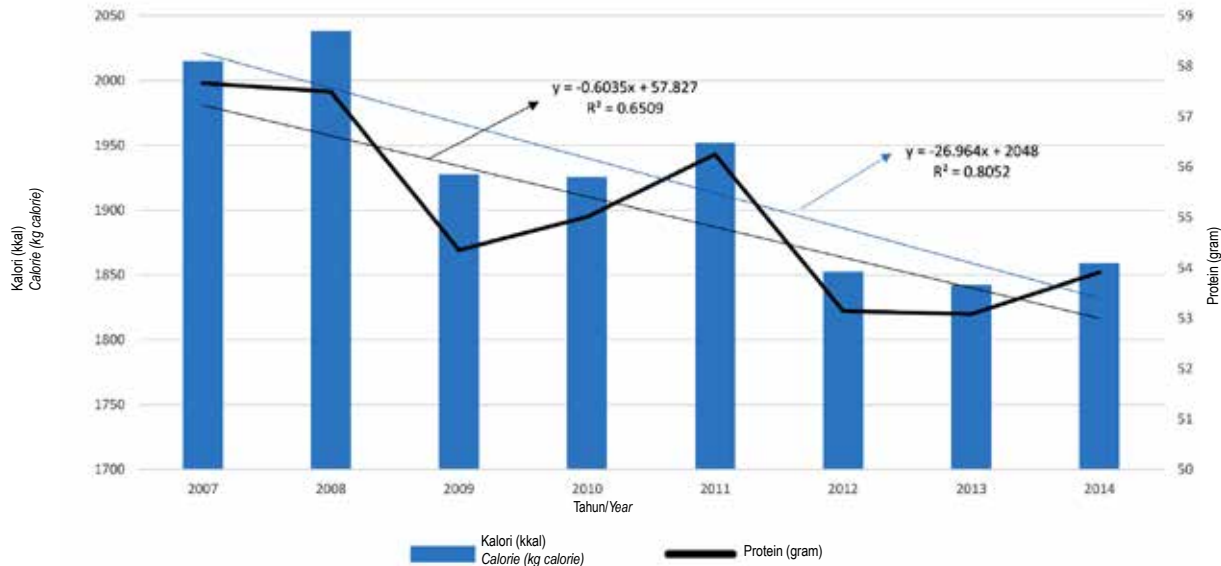
Food quality should be an inseparable part of food policy to guarantee sufficient food availability for members of the community so they can consume healthy and nutritious foods in order to live healthily (World Bank, 2016). Regulation of the Ministry of Health No. 75, 2013 has established that the average degree of energy and protein fulfillment for Indonesian people are 2,150 kcal and 57 grams of protein per person per day at consumption level. Nevertheless, facts prove that generally there has not been any improvement in the food consumed by the Indonesian people, moreover, the situation tends to become even worse.

As can be observed in Graphic 6, the average energy fulfillment of Indonesian people in 2014 was below the required standard, only about 1,850 kg calories. Meanwhile, the average protein fulfillment is already above the mandatory standard, but has tended to decline from year to year. A quantitative study by SMERU (Kusumawardhani, 2016) affirmed this phenomenon. The report explains that due to fuel price increase, the (poor) community reduced the quantity and quality of food consumed. In addition, about 15%–20% of the (poor) community reduced protein consumption.



Grafik 5. Persentase pengeluaran rata-rata/kapita/bulan bahan makanan & minuman jadi berdasarkan kelompok pengeluaran dan kategori daerah, 2013 | Graphic 5. Percentage of average/capita/month expenditure for prepared food and beverages based on expenditure group and area, 2013.

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.



Grafik 6. Rata-rata konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, 2007–2014 | Graphic 6. Average calorie and protein consumption per capita per day, 2007–2014

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik.

Penutup

Badan Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi biasanya disertai dengan peningkatan suplai makanan suatu negara dan penghapusan bertahap kekurangan makanan sehingga meningkatkan status gizi secara keseluruhan penduduk negara itu (Badan Ketahanan Pangan, 2012). Namun, saat ini banyak negara, termasuk Indonesia, justru menghadapi ancaman krisis pangan global yang, antara lain, merupakan dampak perubahan iklim global, dinamika ekonomi global (krisis ekonomi di negara-negara maju), dan gejolak harga pangan serta energi (Menteri Pertanian dalam Kementerian Perdagangan, 2013). Bagi Indonesia, kebijakan diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis sumber daya lokal sangat relevan untuk terus didorong. Selain itu, pengetahuan masyarakat mengenai pangan dan gizi yang berkualitas harus terus ditingkatkan. ●

Daftar Acuan

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI (2012) 'Roadmap Diversifikasi Pangan 2011–2015'. Edisi 2. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik (2016) 'Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia, 1999, 2002–2014'. [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/937>> [5 Agustus 2016].
- Chai, Andreas dan Alessio Moneta (2010) 'Retrospectives Engel Curves' [Kurva Engels Retrospektif] dalam Journal of Economic Perspectives. Volume 24, Nomor 1: 225–240 [dalam jaringan] <http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/34021/63302_1.pdf?sequence=1> [14 Oktober 2016].
- Frazao, Elizabeth, Margaret Andrews, David Smallwood, dan Mark Prell (2007) 'Food Spending Patterns of Low-Income Households—Will Increasing Purchasing Power Result in Healthier Food Choices?' [Pola Belanja Makanan pada Rumah Tangga Berpendapatan Rendah—Akankah Daya Beli yang Meningkatkan Menghasilkan Pilihan Makanan yang Lebih Sehat?] dalam Economic Information Bulletin 29–4 (September). Washington, DC: U.S. Department of Agriculture [dalam jaringan] <<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/59430/2/eib29-4.pdf>> [21 Oktober 2016].

Closing

Food and Agriculture Organization (FAO) stated that economic development is usually accompanied by an increase of a country's food supply and the gradual eradication of food shortage, so it will increase the nutritional status of the entire population (Badan Ketahanan Pangan, 2012). However, at present, there are many countries, including Indonesia, that face the threat of global food crisis. This crisis, among other factors, is due to the impact of global climate change, dynamics of the global economy (economic crisis in developed countries), and food and energy price volatility (Minister for Agriculture in Kementerian Perdagangan, 2013). For Indonesia, policies aiming to diversify the consumption of main food commodities based on local resources are policies which should be continuously supported. In addition, community knowledge on quality food and nutrition must be constantly enhanced. ●

List of References

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI (2012) 'Roadmap Diversifikasi Pangan 2011–2015' [The Roadmap of Food Diversification 2011–2015]. Edisi 2. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Badan Pusat Statistik (2016) 'Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang, Indonesia, 1999, 2002–2014'. [Percentage of Average Expenditure per Capita per Month by Group of Goods, Indonesia, 1999, 2002–2014] [online] <<https://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/937>> [5 August 2016].
- Chai, Andreas and Alessio Moneta (2010) 'Retrospectives Engel Curves' [Kurva Engel Retrospektif]. In Journal of Economic Perspectives. Volume 24, Nomor 1: 225–240 [online] <http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/34021/63302_1.pdf?sequence=1> [14 October 2016].
- Frazao, Elizabeth, Margaret Andrews, David Smallwood, and Mark Prell (2007) 'Food Spending Patterns of Low-Income Households—Will Increasing Purchasing Power Result in Healthier Food Choices?' In Economic Information Bulletin 29–4 (September). Washington, DC: U.S. Department of Agriculture [online] <<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/59430/2/eib29-4.pdf>> [21 October 2016].

- Kementerian Perdagangan RI (2013) 'Laporan Akhir Analisis Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia'. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Kusumawardhani, Niken, Dyan Widyaningsih, Valentina Y. D. Utari, Joseph Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan Michelle Andrina (2016) 'The Dynamics of Poor Women's Livelihood: A Case Study amidst a Fuel Price Change' [Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM]. Draft Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Insitute.
- Nurbani, Rachma Indah (2015) 'Food Price Volatility and the Worrying Trend in Children's Snacking in Indonesia.' [Gejolak Harga Pangan dan Kecenderungan Mengkhawatirkan dalam Kebiasaan Makan Makanan Ringan pada Anak-anak di Indonesia] dalam IDS Bulletin 46 (6): 90-97 (November). Oxford dan Malden: John Wiley & Sons Ltd. [dalam jaringan] <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7759/IDSB_46_6_10.1111-1759-5436.12191.pdf?sequence=1> [17 Februari 2016].
- Pangaribowo, Evita Hanie (2011) 'Demand for Food of Indonesian Households: Evidence from Longitudinal Data' [Kebutuhan Rumah Tangga Indonesia akan Pangan: Bukti dari Data Longitudinal]. Bonn: Center for Development Research, University of Bonn. [dalam jaringan] <<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/103429/2/AAEA%20poster%2013187.pdf>> [12 Oktober 2016].
- Regmi, Anita (ed.) (2001) *Changing Structure of Global Food Consumption and Trade* [Perubahan Struktur Konsumsi dan Perdagangan Pangan Global] Washington, DC: Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture [dalam jaringan] <https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/wrs011/14983_wrs011_1_.pdf> [17 Oktober 2016].
- Smith, Lisa C. dan Ali Subandoro (2007) *Measuring Food Security Using Household Expenditure Surveys*. [Mengukur Ketahanan Pangan dengan Menggunakan Survei Pengeluaran Rumah Tangga] Food Security in Practice technical guide series. Washington, DC: International Food Policy Research Institute [dalam jaringan] <<http://www.ifpri.org/publication/measuring-food-security-using-household-expenditure-surveys>> [17 Oktober 2016].
- World Bank Group (2015) 'Country Partnership Framework for The Republic of Indonesia for The Period FY16-FY20' [Kerangka Kemitraan dengan Negara Republik Indonesia untuk Tahun Fiskal 2016-2020]. Washington, DC: World Bank [dalam jaringan] <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23503>> [14 Oktober 2015].
- World Health Organization dan Food and Agriculture Organization (2003) 'Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation' [Makanan, Gizi, dan Pencegahan Penyakit Kronis, Laporan Konsultasi Pakar Bersama WHO/FAO] WHO Technical Report Series 916. Geneva: WHO [dalam jaringan] <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/ac911e/ac911e00.pdf>> [16 Desember 2016].
- The World Bank (2016) 'Pangan untuk Indonesia.' Dalam *Indonesia Policy Briefs- Ide-ide Program 100 Hari*. The World Bank [dalam jaringan] <<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/feeding.pdf>> [25 Agustus 2016].
- UNICEF (2013) 'Improving Child Nutrition – The achievable imperative for global progress.' [Meningkatkan Gizi Anak - Prioritas yang Bisa Dicapai untuk Kemajuan Global] New York: UNICEF [dalam jaringan] <https://www.unicef.org/gambia/Improving_Child_Nutrition_-_the_achievable_imperative_for_global_progress.pdf> [16 Desember 2016].
- The Institute of Statistical Mathematics dan Statistical Information Institute for Consulting and Analysis (2014) *Users' Manual for Handling Resampled Micro Data of Indonesian National Social Economic Survey (SUSENAS): SUSENAS 2006* [Buku Panduan Pengguna untuk Mengolah Data Mikro Hasil Pengambilan Ulang Sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS): SUSENAS 2006] ISM dan SINFONICA [dalam jaringan] <http://www.sinfonica.or.jp/information/research/indonesia/Manual_SUSENAS_2006_V1.2.pdf> [17 Oktober 2016].
- Kementerian Perdagangan RI (2013) 'Laporan Akhir Analisis Dinamika Konsumsi Pangan Masyarakat Indonesia' [Final Report of the Analysis of the Dynamics of Food Consumption in Indonesian Society]. Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Kusumawardhani, Niken, Dyan Widyaningsih, Valentina Y. D. Utari, Joseph Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, and Michelle Andrina (2016) 'The Dynamics of Poor Women's Livelihood: A Case Study amidst a Fuel Price Change.' Draft Research Report. Jakarta: The SMERU Research Insitute.
- Nurbani, Rachma Indah (2015) 'Food Price Volatility and the Worrying Trend in Children's Snacking in Indonesia.' In IDS Bulletin 46 (6): 90-97 (November). Oxford dan Malden: John Wiley & Sons Ltd. [online] <https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/7759/IDSB_46_6_10.1111-1759-5436.12191.pdf?sequence=1> [17 February 2016].
- Pangaribowo, Evita Hanie (2011) *Demand for Food of Indonesian Households: Evidence from Longitudinal Data.* Bonn: Center for Development Research, University of Bonn [online] <<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/103429/2/AAEA%20poster%2013187.pdf>> [12 October 2016].
- Regmi, Anita (ed.) (2001) *Changing Structure of Global Food Consumption and Trade.* Washington, DC: Market and Trade Economics Division, Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture [online] <https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/wrs011/14983_wrs011_1_.pdf> [17 October 2016].
- Smith, Lisa C. dan Ali Subandoro (2007) *Measuring Food Security Using Household Expenditure Surveys.* Food Security in Practice technical guide series. Washington, DC: International Food Policy Research Institute [online] <<http://www.ifpri.org/publication/measuring-food-security-using-household-expenditure-surveys>> [17 October 2016].
- World Bank Group (2015) 'Country Partnership Framework for The Republic of Indonesia for The Period FY16-FY20'. Washington, DC: World Bank [online] <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23503>> [14 October 2015].
- World Health Organization and Food and Agriculture Organization (2003) 'Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases, Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation' [WHO Technical Report Series 916. Geneva: WHO [online] <<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/ac911e/ac911e00.pdf>> [16 December 2016].
- The World Bank (2016) 'Pangan untuk Indonesia' [Food for Indonesia]. In *Indonesia Policy Briefs- Ide-ide Program 100 Hari*. The World Bank [online] <<http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/280016-1106130305439/617331-1110769011447/810296-1110769073153/feeding.pdf>> [25 August 2016].
- UNICEF (2013) 'Improving Child Nutrition – The achievable imperative for global progress.' New York: UNICEF [online] <https://www.unicef.org/gambia/Improving_Child_Nutrition_-_the_achievable_imperative_for_global_progress.pdf> [16 December 2016].
- The Institute of Statistical Mathematics dan Statistical Information Institute for Consulting and Analysis (2014) *Users' Manual for Handling Resampled Micro Data of Indonesian National Social Economic Survey (SUSENAS): SUSENAS 2006* [online] <http://www.sinfonica.or.jp/information/research/indonesia/Manual_SUSENAS_2006_V1.2.pdf> [17 October 2016].

Penyesuaian Tanggung Jawab dan Cara Penyediaan Makanan pada Rumah Tangga Miskin di Perkotaan

Adjusting Responsibilities and Ways of Preparing Food in Urban Poor Households

Hariyanti Sadaly



Hariyanti Sadaly adalah staf Kemitraan Ornop The SMERU Research Institute.



Hariyanti Sadaly is an NGO Partnership Officer at The SMERU Research Institute.

“Nah sekarang Bu, ibu-ibu zaman sekarang maunya beli jadi, jarang masak.” (Diskusi kelompok terfokus dengan tokoh masyarakat, Bekasi, 2014)

“Now, Mam, mothers today prefer to buy prepared food, they hardly cook.” (Focus group discussion with community figures, Bekasi, 2014)

Harga barang-barang kebutuhan hidup yang terus bergejolak mengakibatkan ketidakpastian pendapatan rumah tangga, termasuk rumah tangga miskin perkotaan. Desakan ekonomi ini mendorong perempuan dari rumah tangga miskin perkotaan—yang hanya bisa mengakses makanan dengan membelinya di pasar—untuk ikut bekerja guna mencari penghasilan tambahan. Dengan demikian, kondisi ekonomi ini mengakibatkan perubahan peran anggota rumah tangga, terutama perempuan. Kegiatan memasak, yang biasanya dilakukan perempuan, menjadi berat bebannya dan mahal ketika dihitung biaya kesempatan (*opportunity cost*) dan waktu yang perlu diluangkan karena perempuan juga harus mencari nafkah. Membeli makanan yang sudah dimasak menjadi salah satu cara yang dipilih perempuan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan makan anggota rumah tangga. Namun, di balik kepraktisannya, pilihan tersebut ternyata membawa kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan pangan.

Artikel ini membahas bagaimana peningkatan urbanisasi dan perubahan tatanan hidup masyarakat perkotaan membawa tantangan tersendiri pada penyesuaian tanggung jawab dan cara penyediaan makanan bagi rumah tangga miskin perkotaan serta

The price volatility of daily goods has caused households, including urban poor households, to face uncertainty of income. This economic pressure has pushed women in urban poor households—who are only able to access food by buying them at the market place—to find work in order to obtain additional income. Thus, this economic condition has led to changes in the roles family members play in the household, especially women. The task of cooking, which is usually undertaken by women, now becomes a heavy burden and expensive when calculated against opportunity cost because women are seeking income-earning opportunities. These women choose to buy prepared food as one way of providing food for family members. However, this practical way of providing food raises concern about food quality and safety.

This article discusses how the increase of urbanization and the changes in the living patterns of the urban community lead to challenges in adjusting responsibilities and ways in preparing food for urban poor households, as well as the quality and safety of

implikasinya pada kualitas dan keamanan makanan yang mereka konsumsi. Kisah-kisah di bawah ini diambil dari studi kasus di wilayah peri-urban Bekasi dalam penelitian SMERU, “Hidup di Tengah Gejolak Harga Pangan” (2012–2014).

Tantangan Penyediaan Makanan yang Dialami Rumah Tangga Miskin Perkotaan

Berbeda dengan rumah tangga di wilayah perdesaan yang masih bisa memanfaatkan sumber makanan dari sekitar lingkungan rumah secara cuma-cuma, di perkotaan masyarakat hanya bisa mengakses makanan yang dibeli di pasar. Oleh karena itu, mencari uang tambahan menjadi salah satu cara bagi perempuan dari rumah tangga miskin untuk membantu perekonomian rumah tangga mereka. Di Bekasi yang merupakan wilayah studi ini, terlihat peningkatan nyata jumlah perempuan yang melakukan pekerjaan ekonomi, tak terkecuali mereka yang berasal dari rumah tangga miskin. Mereka terdiri atas anak perempuan remaja yang bekerja di pabrik-pabrik di kawasan industri sekitar, ibu-ibu yang membuka warung atau usaha lain di rumah, ibu-ibu yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau tukang cuci panggilan, dan bahkan ibu-ibu yang melakukan pekerjaan *putting out system*—menerima pesanan dari pabrik sekitar untuk dikerjakan di rumah. Kesibukan ekonomi yang dilakukan perempuan tersebut menyebabkan waktu mereka untuk menyediakan makan bagi keluarga berkurang dan, pada perkembangannya, makanan jadi yang dijual di warung menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan makan rumah tangga.

Hal inilah yang dialami Norma (bukan nama sebenarnya, 20 tahun), seorang ibu muda yang bekerja di perusahaan produsen *remote control* televisi. Ia tinggal bersama anak perempuannya dan adik perempuannya, Maya (bukan nama sebenarnya), yang masih duduk di bangku SMA. Pada hari-hari kerja, Norma dan Maya selalu membeli makanan jadi untuk makan sekeluarga. Pada akhir pekan, mereka bergantian memasak—Sabtu, Maya memasak dan Minggu, Norma memasak.

Dampak Perubahan Penyediaan Makanan

Seperti pengaturan yang pada umumnya berlaku di sebagian besar rumah tangga di Indonesia, penyediaan makanan di dalam rumah tangga di wilayah penelitian ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu dan anak perempuannya yang beranjak dewasa dan belum bekerja. Namun, akhir-akhir ini pengaturan tanggung jawab ini mulai berubah. Ibu-ibu yang biasa memasak makanan untuk keluarga sekarang lebih memilih membeli makanan jadi di warung. Menurut ibu-ibu, membeli makanan matang itu lebih praktis, tidak menghabiskan waktu banyak, pada batasan tertentu dirasa lebih murah, dan memungkinkan mereka mendapatkan makanan yang lebih beragam. Dengan harga yang sama bila dibandingkan dengan membeli makanan jadi, ibu yang memasak sendiri mungkin hanya akan mendapatkan satu atau dua macam makanan. Memasak sendiri juga mengharuskan mereka menyediakan bahan makanan,

the food that they consume. The narratives below are taken from SMERU’s case study in the periurban area of Bekasi, “Life amidst Food Price Volatility” (2012–2014).

The Challenge of Providing Food Facing Urban Poor Households

In contrast to households in rural areas which can still utilize food sources from around their environment for free, the urban community can only access food that are brought from the market place. Therefore, women of urban poor households seek for additional income sources as a way to support the household economy. In Bekasi, which is one of the study area of the research, a significant increase in the number of women who are working to earn money is apparent, including those who are from poor households. These women consist of teenagers who work in factories in the nearby industrial area, women who run food stalls or other businesses from their home, women that work as domestic workers and/or as laundresses, and even women who work in a putting out system—taking orders for doing work at home from factories around the area. Because of their busy work, women have less time to prepare food for their family and subsequently, buying prepared food sold at food stalls become a preferred way of meeting the family’s need for food.

This is what Norma (not her real name, 20 years old), a young mother who works in a company producing TV remote controls, is experiencing. She lives with her daughter and younger sister, Maya (not her real name), who is still in high school. During work days, Norma and Maya always buy prepared food for the whole family. At the end of the week they would take turn cooking, Maya on Saturdays, and Norma on Sundays.

The Impact of Changes in Food Provision

As the way it is generally set in most households in Indonesia, in this study area, family meals are prepared by mothers and their teen-aged daughters who are not yet working. However, recently, the role women play in the responsibility of providing family meals began to change. Mothers who usually cook for their family now prefer to buy food from the food stalls. According to these mothers, to buy prepared food is more practical, less time-consuming, cheaper to some extent, and it makes it possible for them to obtain a variety of food. For the same price as buying prepared food, mothers will only be able to cook one or two kinds of side dish. Cooking also



bumbu, minyak goreng, kompor, dan gas atau kayu bakar. Segala persiapan memasak tersebut tentunya memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak daripada biaya dan waktu yang dicurahkan jika membeli makanan jadi. Hal ini terutama dirasakan oleh ibu yang juga melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang, baik di luar maupun di dalam rumah.

Selain itu, hal yang mendorong perubahan pengaturan tanggung jawab adalah bahwa anak perempuan (remaja) kini banyak yang bekerja di luar rumah sehingga tidak dapat lagi membantu ibu memasak. Perubahan pengaturan kerja di dalam rumah tangga ini makin diperkuat dengan keberadaan warung yang menjual makanan jadi yang makin banyak jumlahnya, seperti tampak di wilayah penelitian ini. Warung-warung tersebut ada yang dimiliki oleh penduduk lokal dan ada juga yang dimiliki oleh penduduk pendatang yang sudah tidak lagi bekerja di wilayah industri sekitar karena sudah melewati batas usia maksimal dan atau sudah habis masa kontraknya. Keberadaan warung yang pada awalnya untuk menjawab kebutuhan masakan siap saji bagi para pendatang yang bekerja di pabrik-pabrik di kawasan industri sekitar kini juga dirasakan manfaatnya oleh rumah tangga penduduk lokal.

Seperti terlihat di hampir semua rumah tangga sampel studi, anggota rumah tangga lebih banyak sarapan dengan makanan yang dibeli di sekitar rumah, seperti nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, roti, dan gorengan. Bahkan, dalam menyediakan minuman untuk suami, ada ibu-ibu yang membeli teh manis atau kopi di warung sebelah rumah mereka. Sebagian anak ada yang sarapan di rumah, tetapi ada juga yang sarapan di sekolah; orang tua hanya membekali mereka dengan uang jajan. Membeli makanan tidak terbatas pada makanan pokok saja, tetapi juga makanan ringan (jajanan). Selain jajan di sekolah, anak-anak akan membeli jajanan lagi di dekat rumah sepulang sekolah, atau bahkan ada sebagian anak yang lebih suka makan siang dengan jajan di warung. Dengan demikian, terlihat adanya peningkatan kebiasaan jajan di kalangan anak-anak, sebagaimana dituturkan responden.

[Anak] yang *olokan* ini satu, tidak boleh tidak ini... bubur harus ada setiap hari. Kalo ada duit, bisa Rp10.000 sehari jajannya. Untuk buburnya ada pagi-pagi *udah* keluar Rp5.000, *belum* jajan di warung. (Norma, bukan nama sebenarnya; perempuan, 20 tahun, Bekasi)

Dia *mah* *kagak* mau makan masakan saya, katanya *nggak* enak dan *pedes*. Dia *nggak* suka ikan asin, dia *mah* minta nasi pake ayam goreng *tuh* di warteg depan. (Sapiah, bukan nama sebenarnya; perempuan, 54 tahun, Bekasi)

means that you will have to buy the raw ingredients needed, the spices, cooking oil, as well as gas or firewood. All this preparation requires more money and time than buying food from food stalls. Women who earn money by working outside the home or in the home, mainly hold this opinion.

Furthermore, what has changed this role is the fact that many teen-aged girls are now working outside the home so they are no longer able to help their mothers cook. The change in task responsibility is further supported by the mushrooming of food stalls as apparent in this research area. Some of these food stalls are owned by local people and some by newcomers who are no longer working in the industrial area because they have reached beyond the maximal age requirement for employment or have finished their contract. These food stalls initially stood to address the need of newcomers, who work at the factories around the area, for prepared food. Now food stalls also benefit local households.

As apparent in almost all of the sample areas of this study, most household members have food bought from food stalls nearby for their breakfast, such as coconut milk rice, turmeric rice, chicken rice porridge, bread, and fried snacks. When serving tea or coffee for their husbands, some women even buy them from the food stall next door. Some of the children eat breakfast at home, but some at school using the snack allowance their parents give them. The foods being bought are not limited to those eaten for daily meals, but also snacks. Besides buying snacks at school, children will buy more snacks at stalls near their home after school or some kids even like to buy snacks for lunch. Thus, there is a significant increase in children's habit of buying snacks at food stalls, as stated by the following respondent.

[This child] is spoiled, she has to have it... there must be porridge every day. If we have money, she can spend Rp10.000 per day on snacks. For her porridge in the morning, Rp5.000 is already spent, that's excluding her snacks from the stall. (Norma, not her real name; female, 20 years old, Bekasi)

He doesn't want to eat the food I cook, he said it tastes bad and is hot. He doesn't like salted fish, he always asks for rice with fried chicken sold at the food stall in front of our house. (Sapinah, not her real name; female, 54 years old, Bekasi)

Pada banyak kasus, pengeluaran untuk jajan anak di rumah tangga miskin yang menjadi sampel studi ini bisa mengambil porsi yang besar bila dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga lainnya. Selain itu, konsumsi makanan jadi yang dibeli di sekitar rumah juga mengundang kekhawatiran akan nilai gizi dan keamanan makanan tersebut.

Implikasi Kebijakan

Perubahan dalam pengaturan tanggung jawab penyediaan makanan di rumah tangga miskin perkotaan mengindikasikan meningkatnya anggota keluarga miskin perkotaan, terutama anak-anak dan remaja, yang membeli makanan jadi di warung makanan yang pada akhirnya membawa kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan pangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan, lebih dari 45% jajanan anak sekolah tidak aman karena mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil (rhodamin B) serta tercemar mikroba (Survei BPOM, 2009). Kualitas dan keragaman konsumsi pangan nasional Indonesia menurun. Hal ini terindikasi dari penurunan skor Pola Pangan Harapan dari 85,6 pada 2011 menjadi 83,5 pada 2012 dan 81,4 pada 2013 yang masih jauh dari target sebesar 91,5 (Badan Ketahanan Pangan, 2013). Ada kekhawatiran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang akan makin menurun jika tidak ada pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan pangan jajanan. ●

Daftar Acuan

Badan Ketahanan Pangan (2013) 'Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013.' Jakarta: BKP, Kementerian Pertanian [dalam jaringan] <<http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/LAKIP%20BADAN%202014.pdf>> [31 Juli 2015].

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia dan 30 Balai Besar/Balai POM (2009) *Food Watch (Sistem Keamanan Pangan Terpadu): Pangan Jajanan Anak Sekolah*. Vol.I. Jakarta: Badan POM Republik Indonesia.

Survei Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (2009) [dalam jaringan] <<http://www2.pom.go.id/surv/events/pjas2009fw.pdf>> [30 November 2015].

In many cases, in our sample area, expenses for children's snacks in poor households can take up a large proportion of the household's budget compared to other expenditures. Furthermore, the consumption of prepared food bought from stalls around the neighborhood also raises concern on the food's nutritional value and safety.

Policy Implication

Changes in task responsibility of preparing food in urban poor households indicate that there is an increase in prepared food consumption bought from food stalls, especially by children and teenagers, which in turn raises concerns related to food quality and safety. The Drug and Food Agency (BPOM) states that more than 45% of children's snacks sold at school are not safe because it contains dangerous chemicals, such as formalin, borax, textile coloring agents (rhodamine B) and are also contaminated by microbes (BPOM Survey, 2009). The quality and variety of Indonesia's national food consumption has declined which is indicated by the decrease of its score on Desirable Dietary Patterns from 85.6 in 2011 to 83.5 in 2012 and 81.4 in 2013, which is still far from the targeted 91.5 score (Food Security Agency, 2013). There is a concern that Indonesia's quality of human resources will continue to decline in the future if no measure is taken to strengthen the control of the quality and safety of snacks. ●

List of References

Badan Ketahanan Pangan (2013) 'Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2013' [Institution Accountability Report of BKP—LAKIP BKP 2013]. Jakarta: BKP, Kementerian Pertanian [online] <<http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/LAKIP%20BADAN%202014.pdf>> [31 July 2015].

Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia and 30 Balai Besar/Balai POM (2009) *Food Watch (Sistem Keamanan Pangan Terpadu): Pangan Jajanan Anak Sekolah* [Food Watch (Integrated Food Safety System): School Children's Snack]. Vol.I.. Jakarta: Badan POM Republik Indonesia.

Survei Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (2009) [online] <<http://www2.pom.go.id/surv/events/pjas2009fw.pdf>> [30 November 2015].



Sistem Pendukung yang Dapat Dimanfaatkan Masyarakat

Support Systems that Are Used by the Community

Bambang Sulaksono

Bambang Sulaksono adalah peneliti senior The SMERU Research Institute.



Bambang Sulaksono is a senior researcher at The SMERU Research Institute.



Arran McMahon/SMERU

Artikel ini mencoba menyoroti sistem pendukung yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat terjadi gejolak harga pangan. Dari ketiga desa yang diteliti, Desa Gandasari di Kabupaten Bekasi mewakili daerah perkotaan dengan kawasan industri yang ada di sekitarnya, Desa Cibulakan di Kabupaten Cianjur mewakili daerah perdesaan dengan pertanian padi yang bersifat musiman, sedangkan Desa Simpang Empat sebagai daerah perkebunan karet yang dapat memberikan penghasilan setiap hari kepada penduduknya. Perbedaan karakteristik ini memberikan dampak yang berbeda ketika terjadi gejolak harga pangan.

Pada 2012, di daerah sampel dapat dikatakan tidak terjadi gejolak harga pangan yang berat sebagaimana yang pernah terjadi pada 2008 ketika terjadi krisis keuangan global. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa harga-harga bahan pangan dan bahan bakar (minyak tanah) selalu naik, terlebih pada saat menjelang Lebaran atau tahun baru. Semua wilayah telah menggunakan bahan bakar gas bersubsidi dari pemerintah sehingga dampak kenaikan harga minyak tanah tidak berpengaruh. Khusus untuk Banjar, yang terjadi justru penurunan produksi dan harga getah karet yang cukup besar karena adanya kemarau panjang yang cukup berdampak pada kehidupan masyarakatnya.

This article highlights support systems that the community uses when food prices are volatile. Of the three villages studied, Desa Gandasari in Kabupaten Bekasi is representative of urban areas with a surrounding industrial zone, Desa Cibulakan in Kabupaten Cianjur represents rural areas reliant on seasonal rice agriculture, while Desa Simpang Empat in Kabupaten Banjar is the site of rubber plantations which generate a daily income for residents. These different characteristics result in differing experiences arising from the impact of food price volatility.

In 2012, the sample areas did not experience the kind of extreme food price volatility that occurred during the 2008 global financial crisis. However, there remains a tendency for food and gas (LPG) prices to constantly increase, particularly in the lead-up to Lebaran or the new year. All areas use cooking gas subsidized by the government, so the price rise of kerosene had no effect. In Banjar, a long dry season saw a significant decline in both the rubber harvest and rubber latex prices, both of which had a severe impact on the community.

Temuan hasil studi menunjukkan bahwa sistem pendukung yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada saat terjadi gejolak harga pangan dapat berbentuk formal atau informal. Namun, yang paling banyak diakses oleh penduduk adalah dukungan yang bersifat informal.

Dukungan Formal

Dalam menghadapi gejolak harga pangan, dukungan pemerintah bagi komunitas sangat terbatas. Namun, paling tidak terdapat satu jenis program yang sudah ada yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika terjadi kondisi darurat, yakni Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin).

Raskin adalah jenis bantuan yang dirasakan paling bermanfaat oleh masyarakat. Beras Raskin—yang di saat kondisi baik kurang disukai karena kualitasnya jelek sehingga sering ditukar dengan beras yang kualitasnya lebih baik atau digunakan untuk pakan ternak—pada saat krisis dikonsumsi sendiri. Di Bekasi, terdapat program dana bergulir dan kredit koperasi yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat. Di Banjar, pada saat menjelang Lebaran, pemda bekerja sama dengan pengusaha membuka bazar dengan memberi subsidi pada harga sembako tertentu. Sementara itu, Dolog (Depot Logistik) dalam rangka program ketahanan pangan biasanya akan melakukan operasi pasar beras agar harga kembali stabil.

Dukungan Informal

Dukungan sosial yang bersifat informal paling banyak justru didapatkan dari anggota komunitas sendiri. Penduduk Bekasi sebagai wilayah perkotaan memiliki sumber dukungan sosial lebih banyak untuk sumber pinjaman, alternatif pekerjaan, dan sumber keuangan lainnya. Sementara itu, di Cianjur dan Banjar yang bersifat perdesaan, alternatifnya lebih terbatas (lihat Tabel 1).

Jenis dukungan sosial yang paling banyak dipilih ketika terjadi gejolak harga pangan adalah meminjam. Sebagian besar penduduk menyatakan bahwa dukungan pinjaman dari keluarga lebih dibutuhkan dan lebih efektif. Mereka dapat mengaksesnya dengan mudah dan pengembaliannya lebih fleksibel, serta tidak perlu membayar bunga. Untuk meminjam kepada rentenir, aksesnya lebih sulit daripada kepada saudara.

Pemerintah perlu membangun sistem keuangan di tingkat komunitas untuk meringankan beban masyarakat ketika terjadi gejolak harga pangan.

The government should establish financial systems at the community level to ease people's burden during food price volatility.

This study found that support systems used by the community during periods of volatile food prices can take the form of both formal and informal structures. However, it is the informal structures that are most frequently accessed by residents.

Formal Supports

In facing food price volatility, government support for the community is very limited. However, there is at least one type of program that can be used by the community during times of crisis: the Rice for Poor Households (Raskin) program.

Raskin is the type of assistance that is considered most useful by the community. Raskin rice—which, during noncrisis periods is seen unfavorably because of its low quality, to the point that is exchanged for better quality rice or used as animal feed—is consumed during periods of crisis. In Bekasi, rolling credit and credit cooperatives can be accessed by the community. In Banjar, in the period leading up to Lebaran, the regional government works with businesses to open bazaars and provide subsidies for a limited range of household essentials. Meanwhile, Dolog (local logistical agencies) usually conduct food security programs by holding rice markets operations to stabilize prices.

Informal Supports

Many informal social supports are sought out within the community itself. Residents of Bekasi, as an urban region, have access to more social support resources in the form of sources of lending, alternative employment, and other financial resources. Meanwhile, in the village environments of Cianjur and Banjar, resources are more limited (see Table 1).

The type of informal social support most frequently chosen during periods of volatile food prices is obtaining a loan. A large number of residents reported that borrowing from family was more needed and also more effective. They can access loans from family easily, repayments are flexible, and there is no need to pay interest. Accessing moneylenders is more difficult than relatives.



Hariyanti Sadaly/SMERU

Tabel 1. Dukungan Informal | Table 1. Informal Support

No	Dukungan Informal Type of Informal Support	Perkotaan Urban	Perdesaan Rural	
		Bekasi	Cianjur	Banjar
1	Berutang kepada warung <i>Credit at food stalls</i>		✓	✓
2	Meminjam kepada saudara <i>Borrowing from relatives</i>	✓	✓	✓
3	Meminjam kepada tetangga <i>Borrowing from neighbors</i>	✓	✓	✓
4	Meminjam kepada teman <i>Borrowing from friends</i>			✓
5	Meminjam kepada rentenir <i>Borrowing from money lenders</i>	✓	✓	✓
6	Meminjam kepada koperasi <i>Borrowing from cooperatives</i>	✓		
7	Meminjam kepada pengepul karet <i>Borrowing from rubber intermediary traders</i>			✓
8	Meminjam kepada pegadaian <i>Borrowing from pawn shops</i>			✓
9	Mencari pekerjaan lain <i>Finding alternative employment</i>	✓		✓
10	Mencari kerja tambahan <i>Finding side jobs</i>	✓		✓
11	Menjadi sopir ojek <i>Working as a motorcycle taxi (ojek) driver</i>	✓		✓
12	Menjadi buruh cuci atau pengasuh anak <i>Being a laundry worker or doing child-minding work</i>	✓		
13	Menjadi kuli angkut barang <i>Working as a laborer, carrying heavy goods</i>	✓		
14	Menambah jam kerja/lembur <i>Working additional hours</i>	✓		✓
15	Menambah jam buka warung <i>Extending food stall operational hours</i>	✓		
16	Dari uang zakat <i>From alms funds</i>	✓	✓	✓

Sumber: Hasil studi lapangan (2012) | Source: Field study results (2012).

Di Bekasi, karena banyak kaum pendatang yang bekerja di pabrik, kebiasaan meminjam di warung lebih dibatasi. Di Banjar, petani karet dapat meminjam kepada pengepul karet yang akan diperhitungkan dari hasil getah karet yang disetorkan, atau meminjam kepada pegadaian. Karena semaraknya kegiatan arisan di sini serta dengan jumlah uang arisan yang cukup besar, banyak anggota masyarakat yang mampu membeli perhiasan atau sepeda motor yang kemudian dapat digadaikan pada waktu dana dibutuhkan.¹

Untuk upaya mencari pekerjaan lain, pekerjaan tambahan, kerja lembur, atau menambah jumlah jam lebih banyak terjadi di Bekasi. Ini karena sebagai wilayah perkotaan, cukup banyak jenis pekerjaan yang tersedia di Bekasi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan kelompok masyarakat, kaum laki-laki yang biasanya berusaha mencari sumber penghasilan lain (dengan mencari pekerjaan yang lain). Seperti dikatakan oleh seorang peserta, daripada bekerja, “perempuan lebih cenderung mencari sumber pendanaan lain sebagai sumber pendapatan karena alasan agama (istri adalah sebagai ibu rumah tangga), sementara yang laki-laki berusaha mencari tambahan pendapatan dari sumber lain.”

¹ Sistem bagi hasil di perkebunan karet rakyat di Banjar cukup adil. Bagi hasil antara petani karet dengan penyadap karet adalah 1:1, bahkan untuk tanaman karet yang sudah tua dan tinggi-tinggi, pembagiannya adalah 2 bagian untuk penyadap karet dan hanya 1 bagian untuk petani karet. Namun, seorang penyadap karet rata-rata hanya mampu menyadap karet 1–2 ha per hari.

In Bekasi, due to the large number of migrants who work in factories, the use of credit to purchase goods at stalls is limited. In Banjar, rubber farmers can borrow from intermediaries who can then be repaid from the rubber later collected, or from pawn shops. Due to the rise of rotating savings and credit groups (arisan) here, as well as the fact that the amount of money distributed is quite significant, many community members are able to purchase jewelry or motorcycles which can then be pawned when money is needed.¹

Efforts to find alternative work, extra work, and overtime were most frequently found in Bekasi. This is because Bekasi, as an urban area, provides a significant number of different employment opportunities. Based on the results of focus group discussions (FGDs) with community groups, it is men that usually try to find other sources of income (through looking for other jobs). As one participant said that rather than work, “for religious reasons (the women’s role as housewife), women are more inclined to seek out alternative sources of funding to serve as an alternative income, while men are more likely to look for additional income from other sources.”

¹ The profit-sharing system in rubber plantations in Banjar is quite fair. The distribution of profits between farmer and rubber tapper is 1:1, and for crops that are very old or tall, the division is 2:1 in favor of the rubber tapper. However, a rubber tapper is only able to harvest 1–2 hectares per day.

Di Cianjur, alternatif pekerjaan lain relatif terbatas bagi penduduk daerah ini. Ini karena sebagai daerah dengan mata pencaharian yang bersifat musiman, tidak banyak jenis pekerjaan yang tersedia di desa. Di Banjar, masih terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dapat digeluti, seperti menjadi kuli pembuatan jalan, tukang, buruh bangunan, atau sopir ojek karet (mengangkut getah karet dari kebun ke tempat pengepul).

Sumber lain bagi ketiga kabupaten adalah dari penerimaan zakat (zakat fitrah dan zakat mal), tetapi sangat terbatas karena hanya diberikan satu kali dalam satu tahun, yaitu pada saat Idul Fitri.

Penutup

Dalam menghadapi gejolak harga pangan, dukungan paling penting justru berasal dari dukungan informal anggota komunitas sendiri. Untuk dukungan formal, setidaknya terdapat satu jenis program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat ketika terjadi kondisi darurat, yakni Raskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan perekonomian rakyat serta membangun sistem keuangan di tingkat komunitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. ●

In Cianjur, alternative employment is relatively limited for residents. This is because it is an area dominated by seasonal livelihood sources; there is not a wide range of work available in the village. In Banjar, there are still a number of jobs that can be undertaken, such as day laboring in road construction, working as a laborer for general construction, or transporting rubber latex from the plantation fields to where the latex is collected.

Another source for three kabupaten is from the proceeds of religious alms (zakat fitrah and zakat mal), but this is limited because these funds are only distributed once a year—at Idul Fitri, the end of the fasting month.

Conclusion

In facing food price volatility, the support that is most important is informal in nature, and comes from community members themselves. In terms of formal support, there is at least one government support program that can be used by the community in a crisis, which is Raskin. Because of this, the government should continue to strengthen community economies and establish financial systems at the community level that can serve the needs of the local population. ●



Hariyanti Sadaly/SIMERU

Di Bekasi, laki-laki biasanya berusaha mencari sumber penghasilan lain dengan mencari pekerjaan yang lain.

In Bekasi, men usually try to find other sources of income through looking for other jobs.

Aspirasi Anak Muda terhadap Pekerjaan di Sektor Pertanian

Young People's Aspirations for Working in Agriculture

Hariyanti Sadaly

Hariyanti Sadaly adalah staf Kemitraan Ornop The SMERU Research Institute.



Hariyanti Sadaly is an NGO Partnership Officer at The SMERU Research Institute.



Rehmat Juhandi/SMERU

Amit-amit Bu menjadi petani, saya tidak mau bekerja panas-panas kulit jadi hitam. Mama saya bilang jangan jadi petani, hasilnya tidak akan mencukupi keperluan hidup, *gak* punya masa depan, lebih baik cari pekerjaan di kota. (Santi¹, Perempuan, 19 tahun, Cianjur)

Heaven forbid I become a farmer; I don't want to work in the sun until my skin turns black. My mother told me not to be a farmer: the income won't be enough to make a living, you'll have no future, it's better to find work in the city. (Santi¹, Female, 19 years old, Cianjur)

Menjadi petani tampaknya tidak lagi menjadi pilihan hidup bagi para anak muda masa kini. Jika pun ada anak muda yang menjadi petani, itu karena tidak ada pilihan pekerjaan lain. Masalah-masalah yang melemahkan daya saing sektor pertanian menyebabkan sektor pertanian tidak diminati oleh para generasi muda.

Tulisan ini diangkat dari hasil studi SMERU, "Hidup di Tengah Gejolak Harga Pangan" (2012—2015), di tiga desa sampel yang memiliki karakteristik wilayah berbeda. Desa sampel Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mewakili daerah yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian di sektor pertanian, terutama sebagai petani tanaman pangan padi. Desa sampel Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mewakili daerah semiperkotaan yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian di sektor industri sebagai

It seems that becoming a farmer is no longer the choice of young people these days. Indeed, where there are young people who do become farmers, it's because they have no other options for work. Problems that have weakened the competitiveness of the agricultural sector have made it less appealing to young people.

This article is taken from the results of a SMERU study on "Life During Food Price Volatility" (2012—2015) in three sample villages that have different regional characteristics. The sample village in Kabupaten Cianjur, West Java, is representative of areas where a large part of the population seeks its livelihood in agriculture, particularly from rice cultivation. The sample village of Kabupaten Bekasi, in West Java, is representative of semi-urban areas where a large proportion of the population relies on the industrial sector to make a living, working in factories and providing board-house

¹ Nama-nama yang tertulis dalam artikel ini, bukan nama sebenarnya.

¹ Names in this article have been changed.

pekerja pabrik dengan usaha penunjang lainnya seperti penyedia jasa rumah kos dan penjual makanan. Sementara itu, di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, desa sampel mewakili karakteristik daerah yang mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di sektor perkebunan karet, yakni sebagai penyadap karet. Tulisan ini mencoba memotret aspirasi generasi muda di desa dan di kota terkait minat untuk menggeluti pekerjaan di sektor pertanian.

Jenis Pekerjaan Apa yang Banyak Digeluti oleh Remaja Akhir-Akhir Ini?

Di Kabupaten Cianjur, masih dapat ditemui beberapa remaja laki-laki dan perempuan yang bila musim panen padi membantu orang tuanya. Sebagai contoh, anak laki-laki mengangkut padi yang sudah dipanen ke rumah pemilik sawah, sedangkan anak perempuan membantu merontokkan bulir padi dengan cara menginjak-injaknya di atas tikar. Namun, setelah musim panen berakhir, anak muda laki-laki lebih memilih bekerja menjadi buruh bangunan di dalam maupun di luar Kota Cianjur dan ada pula yang menjadi buruh serabutan pada tetangga di sekitar tempat tinggalnya dengan melakukan pekerjaan seperti membersihkan tangki air atau mengangkat dan mengantarkan barang. Ada juga anak muda yang bekerja sebagai sopir *angkot* atau sopir ojek serta ada yang bekerja di bengkel atau berjualan makanan.

Setelah panen, remaja perempuan cenderung memilih bekerja di pabrik-pabrik yang banyak tumbuh di pinggiran Kota Cianjur—seperti pabrik sepatu, batu, dan garmen, atau bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Kota Cianjur atau di Jakarta. Hal ini diungkapkan Kurnia (perempuan, 21 tahun), “kalau *cewek mah* banyak kerja di Jakarta, jadi pembantu.” Sebagian remaja perempuan yang tidak bekerja juga lebih memilih untuk menikah daripada harus bekerja sebagai petani.

Lain halnya di Kabupaten Bekasi, tidak satu pun anak muda yang bekerja di sektor pertanian. Mungkin karena kehidupan mereka memang tidak bersentuhan dengan sektor pertanian. Remaja di desa sampel di Bekasi memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan di luar sektor pertanian yang bagi mereka lebih menarik. Sebagian besar anak muda di desa sampel bekerja sebagai buruh pabrik, pekerjaan yang mereka anggap dapat lebih menjamin perolehan uang secara rutin serta lebih bergengsi dan tidak perlu berkotor-kotor.

Lebih enak jadi buruh pabrik, kerja *gak* panas-panasan, *gak* kotor. Hasilnya gajinya bisa *dipake* buat beli hp, baju, kosmetik, tas, *ato* kebutuhan remaja lainnya. Bisa *ngirim* ke orang tua juga. (Santi, perempuan, 19 tahun)

accommodation or selling food as supplementary activities. Meanwhile, in Kabupaten Banjar, South Kalimantan, the sample village represents areas where most people’s livelihoods are derived from rubber plantations; that is, working as rubber tappers. This paper attempts to depict the aspirations of young people regarding their interest in building a future in the agriculture industry.

What Are the Types of Work Young People Do?

In Kabupaten Cianjur, one can still find young men and women who help their parents during the harvest season. For example, male children may carry the harvested product to the field owner, while female children help to separate the grains by trampling on a mat. However, when the harvest season ends, young men prefer to find construction work in or around Kota Cianjur, and there are also those who take up casual jobs for neighbors, such as cleaning water tanks and transporting goods. Others work as public transport (angkot) or motorcycle taxi (ojek) drivers, while there are also those that work at a mechanic garage or who sell food.

After the harvest, young women are more likely to choose work in the factories that have popped up on the outskirts of Kota Cianjur, such as shoe, stone, and garment factories, or to work as domestic workers in Cianjur or Jakarta. This was expressed by Kurnia (female, 21 years old), “for young women, lots work in Jakarta and become domestic workers.” A proportion of young women who are not employed choose to marry rather than be obliged to work as farmers.

It’s a different case in Kabupaten Bekasi, where not one young person works in the agricultural sector. Perhaps this is because their lives do not come into contact with the sector. Young people in the sample village had more options for work outside the agricultural sector, which they found more interesting. Most of the young people in the sample village are employed in factories, which they believe provide a more consistent income, offer more prestige, and doesn’t get them dirty.

It’s better to be a factory worker, the work isn’t in the heat, isn’t dirty. The wage we get can be used for buying mobile phones, tops, cosmetics, bags, or other things that young people need. It can be sent to parents too. (Santi, female, 19 years old)

Di Kabupaten Cianjur, orang tua bekerja pada sektor pertanian, anak-anak mereka hanya membantu pada musim panen.

In Kabupaten Cianjur, parents work in the agricultural sector, their children only help during the harvest season.



Rizki Fitriani/SMERU

Selain itu, banyak juga yang memilih bekerja sebagai sopir ojek, pelayan toko, mekanik bengkel, buruh jagal sapi, di samping berdagang. Seorang anak muda pendatang menyatakan bahwa jika nanti sudah tidak bisa diterima lagi sebagai pekerja pabrik, dia akan pulang ke kampung agar lebih dekat dengan keluarga untuk kemudian lebih memilih bekerja sebagai pedagang daripada menjadi petani. Ada juga sebagian remaja di Bekasi yang kami temui menunjukkan minatnya untuk bekerja di sektor pertanian, tetapi sebagai petani pemilik lahan, bukan buruh tani.

Sebaliknya, anak muda di desa sampel di Kabupaten Banjar menunjukkan minat yang makin meningkat untuk bekerja di sektor pertambangan (batu bara) yang banyak tumbuh di sekitar wilayah mereka atau untuk menjadi karyawan di perusahaan. Namun, kebanyakan anak muda yang sudah tidak bersekolah, khususnya dari kalangan kurang mampu, memilih menjadi penyadap karet. Minat untuk bekerja di perkebunan karet lebih banyak daripada untuk bekerja di sektor pertanian pangan padi. Menurut mereka, menjadi penyadap karet berpenghasilan lebih baik daripada menjadi petani padi karena mereka mendapat penghasilan secara rutin, asal rajin menyadap karet dan menjualnya setiap hari.

Di lain pihak, salah seorang buruh tani muda menuturkan bahwa kesejahteraannya tidak terjamin kalau hanya menjadi buruh penyadap karet dan tidak memiliki lahan atau kebun sendiri. Oleh karena itu, ia berkeinginan untuk bekerja di pertambangan batu bara dengan menggunakan ijazah SMK-nya yang saat ini masih ditahan oleh pihak sekolah karena ia belum membayar uang ujian akhir sekolah. Sementara itu, seorang responden lainnya berpendapat bahwa generasi muda sekarang cenderung malas membantu orang tuanya menyadap karet karena mereka dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas modern seperti sepeda motor, telepon seluler, dan uang jajan yang rutin.

Aside from that, many also choose to work as ojek drivers, store clerks, mechanics, and abattoir workers, in addition to petty trading. A young internal migrant said that if he was unable to continue working at the factory, he would return to his village to be close to family, but would work as a petty trader rather than a farmer. We also came across young people in Bekasi who showed interest in the agricultural sector, but they were more interested in becoming land-owning farmers, not farm laborers.

In contrast, young people of the sample village in Kabupaten Banjar showed an increasing interest in the (coal) mining industry, which has flourished in the surrounding area, or in becoming a staff in private companies. However, the majority of those who are no longer in school, particularly those from poorer backgrounds, become rubber tappers. Interest shown toward working in rubber plantations is greater than that toward work in rice fields. According to them, working as a rubber tapper provides a better income than working in rice fields because they can earn a routine income by working hard to tap rubber and sell it daily.

On the other hand, one young farm laborer explained that his welfare could not be guaranteed by working only as a rubber tapper, with no pasture or plantation land of his own. Due to this, he wants to work in the coal mining industry, making use of his vocational high school diploma which is still being held by the school because of failure to pay the school's final examination costs. At the same time, another respondent suggested that the younger generation now is lazy in helping their parents tap rubber because they have been spoiled with modern conveniences such as motorcycles, mobile phones, and regular pocket money.

Remaja dari keluarga mampu di desa ini biasanya berpendidikan lebih tinggi dan menjadi petani bukanlah pilihan mereka. Remaja perempuan kebanyakan memilih menjadi guru sekolah, sedangkan remaja laki-laki memilih bekerja di bengkel sebagai mekanik atau operator alat berat di pertambangan batu bara.

Apa Pendapat Anak muda tentang Bekerja di Sektor Pertanian?

Sebagian besar anak muda di lokasi studi menganggap bahwa pekerjaan di sektor pertanian identik dengan pekerjaan kasar yang berupah rendah dan lebih cocok dilakukan oleh mereka yang berpendidikan dan berkemampuan rendah.

Selain itu, pekerjaan di sektor pertanian juga dipandang penuh ketidakpastian dan risiko, mulai dari risiko musim yang makin tidak menentu, serangan hama, hingga biaya produksi dan harga komoditas hasil pertanian yang selalu bergejolak. Bekerja di sektor pertanian juga membutuhkan waktu lama untuk dapat memperoleh hasilnya. Anak-anak muda di lokasi studi mengatakan bahwa menjadi petani tidak bisa memberikan masa depan yang baik, menjadi petani penghasilannya hanya musiman dan tidak menentu, juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ditambah lagi, pertanian memerlukan modal yang cukup besar, kemudian bila panen belum tentu hasilnya dapat menutupi biaya, apalagi bila terkena serangan. Seorang laki-laki, peserta Kelompok Diskusi Terfokus Remaja menyimpulkan: “modal bertani besar, hasilnya rendah.”

Namun, tidak berarti bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk menggerakkan minat remaja untuk bekerja di sektor pertanian. Seorang remaja laki-laki dari desa sampel di Kota Cianjur, misalnya, mengatakan bahwa bidang pertanian masih bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan beberapa persyaratan seperti mempunyai usaha lain di luar bertani. Ia bertutur, “*Insyallah* layak *kalo* niat, minimal punya dua usaha, yaitu di bidang pertanian dan farmasi.”

Selain itu, beberapa pekerja muda laki-laki di kawasan industri Kabupaten Bekasi yang berasal dari luar Bekasi dan keluarga petani yang memiliki lahan pertanian, masih memiliki keinginan menjadi petani jika mereka kembali ke kampung halaman saat pensiun kelak. Ada yang ingin menjadi petani sayur saja karena “menjadi petani padi membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan menjadi petani sayuran waktunya relatif lebih cepat” (Rahmat, laki-laki, 24 tahun).

Bahkan di Cianjur ditemui seorang remaja perempuan dari seorang petani penyadap yang berpendapat bahwa menjadi petani juga bisa menghidupi keluarga asalkan menerapkan pola hidup hemat.

Young people from more privileged families usually have a higher level of education and do not choose to become farmers. Young women mainly choose to be teachers, while young men choose to work as mechanics or heavy machine operators in coal mines.

What Opinions do Young People Have about Working in Agriculture?

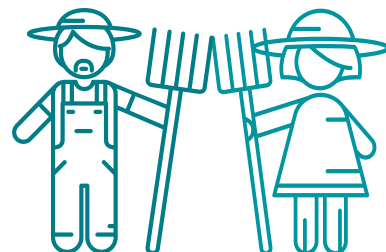
A large proportion of young people in the study locations viewed agricultural work as low-wage, manual labor that is more suited to those of poor backgrounds with limited education.

Aside from that, working in agriculture is also seen to be full of risks and uncertainties, including the increasingly uncertain seasonal patterns and agricultural pests, and the volatility of both commodity and production costs. Working in agriculture also requires a long wait time to see the results. Young people in the study locations reported that becoming a farmer would not give them a good future; incomes are seasonal and uncertain, and does not meet a family's needs. On top of that, agriculture requires significant initial financing, with a possibility that income from the harvest will not cover costs, especially when the harvest is affected by pests. One male participant of the Youth Focus Group Discussion asserted that “the capital for farming is high, the income is low.”

However, this does not mean that there are no prospects for reviving youth interest in agricultural work. A young man from the sample village in Cianjur, for example, said that agriculture can still be relied upon as to meet the costs of livings with some conditions, such as having other business interests outside of farming, “God willing, it is possible if you want it, at a minimum (I’ll have) two businesses, one in agriculture, and a pharmacy.”

In addition, a number of young male workers in the industrial area of Bekasi, who come from land-owning families outside of Bekasi, still have a desire to become farmers when they return home upon retirement. Some want to become vegetable farmers, because “being a rice farmer requires a lot of time, while growing vegetables is relatively quick” (Rahmat, male, 24 years old).

Even in Cianjur we found a young woman from a rubber-tapping family who was of the opinion that life as a farmer could meet a family's needs if their way of life is economical.



Bapak mengajarkan anak-anaknya untuk bergaya hidup hemat, membuat kami tetap bisa bertahan. Mungkin yang tidak bisa bertahan jika orang itu bekerja sebagai petani, tetapi bergaya seperti orang kaya. (Ratri, perempuan, 15 tahun)

My father taught the children to live frugally, which makes us able to survive. Maybe those who can't survive are those that work as farmers, but have a rich person's lifestyle. (Ratri, female, 15 years old).

Bagaimana Membuat Sektor Pertanian Lebih Menarik bagi Anak Muda?

Hal-hal yang membuat anak muda tertarik untuk menggeluti dunia pertanian, antara lain, penggunaan teknologi modern, keragaman bidang pertanian, ketersediaan lahan pertanian, kemudahan mengakses *input* pertanian, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan ilmu pertanian yang didapatkan dari penyuluh dan sekolah pertanian. Namun, ketertarikan anak muda setempat pada bidang pertanian agak sulit dikembangkan di daerah yang lahan pertaniannya sudah makin habis, seperti di desa sampel di Bekasi.

How Can the Agricultural Sector be Made More Appealing to Young People?

Factors that make young people interested in the world of agriculture include, among others, the use of modern technology, diversity in the sector, land availability, ease of access to agricultural inputs, and increased agricultural skills and knowledge gained through extension programs and agricultural schools. However, it is difficult to foster interest in agriculture among young people where land is scarce, such as in the Bekasi sample village.

Supaya sektor pertanian menarik bagi remaja, maka alat yang dipergunakan dalam mengolah lahan memakai traktor, perlu memperbaiki dan meningkatkan teknologi irigasi karena jika memakai pompa air dulu harus membeli per jam @Rp8.000." (Warto, laki-laki, 23 tahun, Bekasi)

For the agricultural sector to be attractive to young people, then equipment that is used to prepare the land should include a tractor, and there needs to be an improvement in irrigation technology because if an air pump is used, one has to pay Rp8,000 per hour. (Warto, Male, 23 years old, Bekasi).

Ilmu tentang pertanian harus dikembangkan, kemungkinan dilakukan sosialisasi melalui sekolah pertanian agar remaja mengerti dan mengenal pertanian dengan lebih baik. (Laki-laki, peserta Diskusi Kelompok Terfokus Remaja, Cianjur)

Knowledge of agriculture has to be developed, possibly through dissemination at agricultural schools so that young people know and understand agriculture better. (Male, Youth Focus Group Discussion Group, Cianjur).

Anak muda di sini sudah tidak bisa bertani karena *ga* punya sawah dan mereka juga malas dan *gengsian*. Biar anak muda *pada* mau bertani, mungkin bisa *pake* alat yang modern, *pake* traktor biar *gak capek*! (Latri, perempuan, 60 tahun, Bekasi)

Young people here can't farm because they don't have rice fields and they are also lazy and think they're too good for it. For young people to want to farm, maybe they have to use modern tools; use a tractor so they don't get tired! (Latri, female, 60 years old, Bekasi).

Implikasi terhadap Ketahanan Pangan

Dengan makin sedikitnya jumlah anak muda yang terjun bekerja di sektor pertanian, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia akan mengalami krisis tenaga kerja sektor pertanian yang pada akhirnya akan berdampak pada ketersediaan pangan. Permasalahan akan timbul ketika sisi penawaran (*supply*) sektor pertanian yang makin lemah ini harus berhadapan dengan perkembangan permintaan (*demand*) pangan yang terus meningkat di masa depan. Ketika tidak ada lagi yang ingin menjadi petani, siapakah yang akan menanam pangan kita? ●

Implications for Food Sustainability

With the decreasing number of young people who come to work in the agricultural sector, it is not impossible that in the future Indonesia will experience an agricultural human resources crisis that will impact food availability. Problems will emerge when decreasing supply is met with increasing demand in the future. When no one wants to become a farmer, who will grow our food? ●

Membangun Ketahanan dalam Menghadapi Harga Pangan: Pelajaran yang Dipetik dari India dan Vietnam

Building Resilience toward Food Price Volatility: Lessons Learned from India and Vietnam

Arran McMahan



Dok. SMERU

Pasar internasional telah memainkan peran cukup besar dalam menggerakkan gejolak harga pangan. Hal ini memberikan dampak yang makin besar di tingkat domestik karena kurangnya data yang akurat dan mudah diakses mengenai kondisi pasar pertanian, adanya spekulasi, serta salah kelola oleh pemerintah dalam hal pengadaan cadangan pangan dan perlindungan sosial. Kontrol yang lebih kuat atas faktor-faktor domestik ini akan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk meredam dampak guncangan harga pada tingkat internasional di masa mendatang.

While the international market has played a considerable role in driving food price volatility, its impact has been compounded at the domestic level by a lack of accurate and accessible data on agricultural market conditions, the presence of speculators, and government mismanagement of procured food stores and social protection. More control over these domestic factors, offers governments an opportunity to buffer against future price shocks at the international level.

India dan Vietnam telah mengalami fluktuasi-fluktuasi cukup besar dalam harga pangan selama sepuluh tahun terakhir. Penyebab hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori: kendala pada sisi penawaran dan tekanan pada sisi permintaan. Kedua hal ini bersama-sama telah menyebabkan naiknya harga-harga. Selain itu, perubahan-perubahan struktural yang dialami kedua negara akibat peningkatan status menjadi negara berpendapatan menengah telah menghadirkan serangkaian tantangan baru. Sebagian besar isu-isu ini merupakan masalah-masalah yang relevan dengan konteks Indonesia. Hal ini menyediakan peluang baik untuk memetik pelajaran-pelajaran berharga.

India and Vietnam have experienced considerable fluctuations in food prices over the last decade, the causes of which can be divided into two categories: supply-side constraints and demand side-pressures, both of which have come together to drive up prices. In addition, the structural changes that both countries have undergone as a result of their move to middle-income status have presented a new set of challenges. Many of these are problems that resonate with Indonesia and offer a potential opportunity to learn valuable lessons.

Arran McMahan adalah lulusan Program Magister Kebijakan Publik Internasional pada University College London di London, Inggris. Dia telah melakukan penelitian tentang perlindungan sosial dan gejolak harga pangan bagi beberapa lembaga, termasuk The SMERU Research Institute, Institute of Development Studies, dan Oxford Policy Management.



Arran McMahan is a Masters graduate in International Public Policy from University College London in the United Kingdom. He has conducted research on social protection and food price volatility for a number of institutes, including The SMERU Research Institute, the Institute of Development Studies, and Oxford Policy Management.

Kendala pada Sisi Pasokan

Baik India maupun Vietnam telah membuka pasar pertanian mereka kepada dunia internasional, suatu hal yang berakibat pada peningkatan produksi tanaman pangan ekspor yang bernilai tinggi (Patnaik, 2009). Ini berakibat pada berkurangnya lahan yang tersedia untuk produksi tanaman pangan untuk konsumsi dalam negeri. Hal yang memperburuk masalah ini adalah meningkatnya persaingan untuk mendapatkan lahan untuk tujuan-tujuan nonpertanian (London dan Van Ufford, 2008). Sebagai akibatnya, kedua negara terpaksa berpaling ke impor untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi dalam pasar pangan internasional.

Kalau saja pemerintah masing-masing negara tersebut bisa melepas dan mendistribusikan pasokan dari cadangan pangan mereka ke pasar, itu mungkin bisa membantu menstabilkan harga pangan. Namun, suatu perpaduan salah kelola, infrastruktur rantai pasokan yang terpisah-pisah, dan tidak adanya pangkalan data pemerintah yang dapat diandalkan (Chanj dan Shinoj, 2011; Nair dan Eapen, 2012; Fulton dan Reynolds, 2012) telah melemahkan kemampuan mereka untuk melakukan hal ini.

Hal yang memperumit masalah pasokan adalah praktik-praktik penimbunan oleh para spekulan. Di India, “penahanan spekulatif atas barang” (Lahiri, 2012) sering sekali terjadi yang berarti bahwa hanya tersedia lebih sedikit barang untuk konsumsi dalam negeri. Vietnam mengalami perkembangan-perkembangan serupa sampai 2008 ketika harga-harga mulai stabil. Menanggapi hal ini, para spekulan membanjiri pasar dengan stok beras (London dan Van Ufford, 2008) yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap harga yang diterima petani untuk produk mereka.

Tekanan pada Sisi Permintaan

Karena kedua negara telah beranjak ke status negara berpendapatan menengah, maka kendala-kendala pada sisi pasokan ini muncul berbarengan dengan peningkatan permintaan akan produk-produk pangan bernilai tinggi seperti buah-buahan, sayuran, susu, dan daging (Chand dan Shinoj, 2011). Meningkatnya persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan stok pangan produksi domestik yang jumlahnya sudah lebih sedikit berperan menguatkan kecenderungan naiknya harga pangan. Sementara peningkatan dalam pendapatan bersih setelah pajak telah mampu meredam kenaikan harga pangan, dalam hal ini masyarakat miskin belum mendapatkan manfaat yang setara. Kesenjangan dalam distribusi kekayaan sebagai akibat proses seperti itu merupakan sesuatu yang lazim terjadi di sebagian besar negara berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi, termasuk Indonesia.

Supply-side Constraints

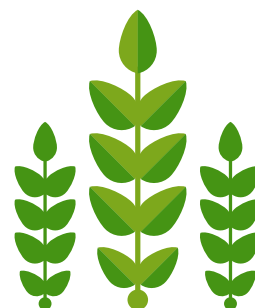
Both India and Vietnam have opened up their agricultural markets internationally, which has resulted in an increase in the production of high value export crops (Patnaik, 2009). This has resulted in a reduction in the amount of land available for the production of crops for domestic consumption. Exacerbating this is the growing competition for land for nonagricultural purposes (London and Van Ufford, 2008). As a result, both countries have had to turn to imports to meet domestic consumption and have become more vulnerable to fluctuations in the international food market.

If either countries' governments had been able to release and distribute supplies from their food stores into the market, it may have helped stabilize food prices. However a combination of mismanagement, a fragmented supply-chain infrastructure and the absence of a reliable government database (Chanj and Shinoj, 2011; Nair and Eapen, 2012; Fulton and Reynolds, 2012) undermined their ability to do this.

Further compounding the supply problems were the hoarding practices of speculators. In India “speculative buffering” (Lahiri, 2012) was commonplace meaning there was less available for domestic consumption. Vietnam experienced similar developments until 2008 when prices began to stabilize. In response, speculators flooded the market with rice stocks (London and Van Ufford, 2008) which in turn negatively impacted on the prices that farmers received for their product.

Demand-side Pressures

As both countries moved into middle income status, these supply-side constraints have coincided with an increase in demand for high value food products such as fruit, vegetables, milk and meat (Chand and Shinoj, 2011). Growing competition among consumers for a smaller amount of domestically produced food stocks served to compound the trend in rising food prices. While an increase in disposable income has gone some way toward buffering against the impact of food price rises, the poor have not benefitted equally in this respect. The resulting inequalities in wealth distribution are something that is common among most developing countries experiencing high growth rates, including Indonesia.



Peran Perlindungan Sosial

Penyediaan perlindungan sosial memainkan peran penting dalam menentukan ketahanan sebuah negara terhadap krisis dengan menyediakan suatu jaring pengaman ketika masyarakat miskin tengah berada dalam situasinya yang paling rentan. Akan tetapi, jika kebijakan-kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan tepat, maka akan kurang efektif. “Sistem Distribusi Publik Bersasaran” di India—yang berupaya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat rumah tangga—mengalami kebocoran besar (sampai 75 persen di Uttar Pradesh (Dev dan Sharma, 2010)) dan gagal menargetkan kelompok masyarakat yang paling rentan. Di atas semuanya, korupsi, salah kelola, penyelewengan, dan penguasaan oleh elite-elite lokal, itu semua telah lebih dalam menggerogoti sistem distribusi tersebut sebagai sebuah kebijakan (Save the Children, 2012).

Di sisi lain, Dekrit 67 di Vietnam, yakni sebuah sistem bantuan langsung tunai yang dimulai pada 2007, secara spesifik menargetkan kelompok masyarakat rentan. Kemudian, Dekrit 10 pada 2010 memperkenalkan pembayaran satu kali bantuan darurat di masa-masa guncangan. Dengan telah siapnya infrastruktur, ini berarti bahwa yang perlu dilakukan hanyalah meluaskan kebijakan yang sudah ada, bukan mengupayakan sebuah kebijakan baru.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan bukti di atas, empat rekomendasi kebijakan disajikan di sini:

Investasi yang lebih besar di bidang pertanian. Namun, investasi ini saja agaknya tidak cukup, kecuali jika ia disertai investasi pemerintah dalam hal infrastruktur dasar (Chand dan Shinoj, 2011). Sama pentingnya, investasi dalam hal pertanian korporat perlu diatur secara memadai untuk menjamin agar pertanian di Indonesia tidak tergiring ke arah tanaman pangan ekspor yang bernilai lebih tinggi (Chandrasekaran dan Bassej, 2013).

Untuk menyeimbangkan hal ini, penting kiranya bahwa investasi swasta dilengkapi dengan investasi pemerintah dengan memfokuskan perhatian pada upaya membekali petani dengan teknologi termutakhir, pelatihan, diversifikasi tanaman pangan, penanaman tanaman pangan yang tahan perubahan iklim, tanaman pangan yang diperkaya secara nutrisi, dan pembangunan fasilitas-fasilitas penyimpanan untuk hasil pertanian mereka. Amat penting kiranya untuk mengembangkan kapasitas organisasi-organisasi seperti Badan Litbang Pertanian Indonesia.

Mengembangkan data yang akurat dan mudah diakses mengenai kondisi pasar. Amat penting kiranya bahwa baik pemerintah maupun produsen memiliki akses terhadap data yang akurat tentang stok, perdagangan, dan harga yang dapat memberikan sinyal-sinyal peringatan mengenai kemungkinan guncangan di masa mendatang (Chand dan Shinoj, 2011). Di Indonesia, ini akan berarti kerja sama yang lebih besar di antara pihak-pihak seperti Kementerian

The Role of Social Protection

The provision of social protection plays an important role in determining a country's resilience to crises by providing a safety net when the poor are arguably at their most vulnerable. However, unless these policies are correctly implemented their effectiveness is undermined. India's 'Targeted Public Distribution System'—which seeks to ensure the availability of essentials at the household level—suffered from high leakage (up to 75 per cent in Uttar Pradesh (Dev and Sharma, 2010)) and failed to target the most vulnerable. On top of this, corruption, mismanagement, misappropriation and capture by local elites have all further undermined it as a policy (Save the Children, 2012).

On the other hand, Vietnam's Decree 67, a system of cash transfer that was established in 2007, specifically targeted the vulnerable. Subsequently, Decree 10 in 2010 introduced a one-time emergency assistance payment in times of shock. Having the infrastructure in place already meant that it was simply a case of expanding a current policy as opposed to implementing a new one.

Policy Recommendations

Based on the evidence above, four policy recommendations are presented here:

Greater investment in agriculture: *However, this alone is unlikely to be enough unless it is accompanied by government investment in basic infrastructure (Chand and Shinoj, 2011). It is equally important that investment in corporate farming is adequately regulated to ensure that agriculture in Indonesia is not geared toward higher value export crops (Chandrasekaran and Bassej, 2013).*

To balance this, it is important for private investment to be supplemented by government investment, focusing on providing farmers with the latest technology, training, crop diversification, the growth of climate change tolerant crops, nutritionally enhanced crops, and the development of storage facilities for their produce. It is essential to develop the capacity of organizations such as the Indonesian Agency for Agricultural Research and Development.

Developing accurate and easily accessible data on market conditions: *It is imperative that both governments and producers have access to accurate data about stocks, trade and prices which could provide advanced signals about future shocks (Chand and Shinoj, 2011). In Indonesia this would mean greater collaboration between the likes of the Ministry of Agriculture, the Indonesian Meteorological, Climatological and Geophysical Agency (BMKG)*

Pertanian, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga akan berarti perlunya pemastian bahwa produsen memiliki akses terhadap data BPS. Manfaat hal ini akan terdapat pada dua sisi: pertama, pemerintah akan bisa menggunakan hal ini dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga memungkinkan mereka untuk menentukan kapan harus membeli dan kapan harus menjual, hal mana membantu menstabilkan harga. Kedua, informasi ini akan menguntungkan petani lokal dengan memungkinkan mereka menentukan harga yang lebih akurat mencerminkan harga pasar untuk produk-produk mereka.

Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyimpan dan mendistribusikan produk-produk pertanian. Investasi dalam hal fasilitas penyimpanan berpendingin amat penting guna memungkinkan pemerintah menyimpan barang-barang yang tidak tahan lama yang merupakan salah satu penggerak utama gejolak pangan (Chand dan Shinoj, 2011).

Mengimplementasikan sistem perlindungan sosial yang efektif untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan selama masa krisis. Sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Vietnam, agar bisa berjalan seefektif mungkin, struktur-struktur ini perlu diberlakukan sebelum terjadinya krisis. Desentralisasi merupakan kunci untuk memungkinkan penargetan sumber daya dengan akurat dan dengan spesifik secara kontekstual. Meskipun demikian, makin terdesentralisasi sistem distribusi, makin terbuka pula sistem itu terhadap korupsi dan salah kelola. Karena itu, adanya mekanisme-mekanisme pemantauan dan akuntabilitas yang memadai di antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah amatlah penting. ●

and Statistics Indonesia (BPS) and ensuring that producers have access to BPS' data. The benefits of this would be two-fold: firstly, governments would be able to use this in the management of their food reserves, allowing them to determine when to buy and when to sell, helping to stabilize prices. Secondly, this information would benefit local farmers by allowing them to demand prices for their goods that more accurately reflect the market price.

Improving government's capacity to store and distribute agricultural produce: investment in modern refrigerated storage facilities is essential to allow governments to store perishable goods which are some of the main drivers of food price volatility (Chand and Shinoj, 2011).

Implementing effective social protection systems to help the most vulnerable during times of crises: As the case of Vietnam shows, these structures need to be put in place prior to the onset of crises to be most effective. Decentralization is key to allow for accurate and contextually specific targeting of resources. However, the more decentralized the distribution system, the more open it is to corruption and mismanagement. Therefore, it is essential that adequate monitoring and accountability mechanisms between national and local level governments are in place. ●



Pemerintah perlu berfokus pada diversifikasi tanaman pangan, penanaman tanaman pangan yang tahan perubahan iklim, tanaman pangan yang diperkaya secara nutrisi, dan pembangunan fasilitas-fasilitas penyimpanan.

The government needs to focus on crop diversification, the growth of climate change tolerant crops, nutritionally enhanced crops, and the development of storage facilities.

Daftar Acuan

- Chand, Ramesh, P. Shinoj, Ashok Gulati, dan Kavery Ganguly (2011) *Managing Food Inflation in India: Reforms and Policy Options* [Mengelola Inflasi Pangan di India: Reformasi dan Opsi Kebijakan]. Catatan Kebijakan ICAR No. 35.
- Chandrasekaran, Kirtana dan Nnimmo Bassey (2013) 'New Alliance for Food Security and Nutrition is a Flawed Project' [Aliansi Baru G8 untuk Ketahanan Pangan dan Gizi adalah Proyek yang Cacat]. *The Guardian* [dalam jaringan] <<http://gu.com/p/3gdzm>> [9 Juni 2013].
- Dev, S. Mahendra dan Alakh N. Sharma (2010) 'Food Security in India: Performance, Challenges and Policies' [Ketahanan Pangan di India: Kinerja, Tantangan, dan Kebijakan.] Seri Kertas Kerja Oxfam India.
- Fulton, Murray dan Travis Reynolds (2012) *The Political Economy of Food Price Volatility: The Case of Vietnam and Rice* [Ekonomi-politik Gejolak Harga Pangan: Kasus Vietnam dan Beras]. Catatan Kebijakan Réseau SPAAN Network: 1–24.
- Lahiri, Hiranya (2012) 'Food Inflation in India and Role of Middlemen: The Case of Speculative Buffering and Government Intervention' [Inflasi Pangan di India dan Peran Makelar: Kasus Penahanan Spekulatif atas Barang dan Intervensi Pemerintah]. *Developing Country Studies 2* (1): 53–62.
- London, Jonathan dan Paul Quarless Van Ufford (2008) *Food Prices, Vulnerability and Food Security in Viet Nam: A UN Perspective* [Harga Pangan, Kerentanan, dan Ketahanan Pangan di Vietnam: Sebuah Perspektif PBB]. Hanoi: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Nair, Sthanu R. dan Leena Mary Eapen (2012) 'Food Price Inflation in India (2008 to 2010): A Commodity-wise Analysis of the Causal Factors.' [Inflasi Harga Pangan di India (2008 sampai 2010): Analisis dalam Hal Komoditas mengenai Faktor-faktor Penyebab]. *Economic and Political Weekly 47*(20): 46–54.
- Save the Children (2012) *Social Protections and Child Malnutrition: India* [Perlindungan Sosial dan Gizi Buruk pada Anak: India]. London: Save the Children.

List of References

- Chand, Ramesh, P. Shinoj, Ashok Gulati, and Kavery Ganguly (2011) *Managing Food Inflation in India: Reforms and Policy Options*, ICAR Policy Brief 35.
- Chandrasekaran, Kirtana and Nnimmo Bassey (2013) G8's 'New Alliance for Food Security and Nutrition is a Flawed Project.' *The Guardian* [online] <<http://gu.com/p/3gdzm>> [9 June 2013].
- Dev, S. Mahendra and Alakh N. Sharma (2010) 'Food Security in India: Performance, Challenges and Policies.' Oxfam India Working Paper Series.
- Fulton, Murray and Travis Reynolds (2012) *The Political Economy of Food Price Volatility: The Case of Vietnam and Rice*. Réseau SPAAN Network Policy Brief: 1–24.
- Lahiri, Hiranya (2012) 'Food Inflation in India and Role of Middlemen: The Case of Speculative Buffering and Government Intervention.' *Developing Country Studies 2* (1): 53–62.
- London, Jonathan and Paul Quarless Van Ufford (2008) *Food Prices, Vulnerability and Food Security in Viet Nam: A UN Perspective*. Hanoi: United Nations.
- Nair, Sthanu R. and Leena Mary Eapen (2012) 'Food Price Inflation in India (2008 to 2010): A Commodity-wise Analysis of the Causal Factors.' *Economic and Political Weekly 47*(20): 46–54.
- Save the Children (2012) *Social Protections and Child Malnutrition: India*. London: Save the Children.



Publikasi Baru | Recent Publications

Rangkuman Eksekutif | Executive Summary



Opinion Leader Research on Barriers to Optimal Infant and Young Child Feeding Practices in Indonesia

Rika Kumala Dewi, Ulfah Alifia, Nurmala Selly Saputri, Vita Febriany & Intani Nur Kusuma
Editors: Liza Hadiz, Mukti Mulyana, Bree Ahrens

(Tersedia hanya dalam bahasa Inggris/Available only in English)

Catatan Kebijakan | Policy Briefs



(Tersedia hanya dalam bahasa Indonesia/Available only in Indonesian)

Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa

Palmira Permata Bachtiar
Editor: Gunardi Handoko



Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan

Irdam Ahmad
Editors: Gunardi Handoko & Liza Hadiz

Memperkuat Sistem Pangan Masyarakat: Jalan Mencapai Kedaulatan Pangan *Strengthening the Community Food System: Toward Sovereignty*

Said Abdullah



DOK. SWERU

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pemenuhan pangan merupakan hak dasar manusia. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah hak, maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan. Ketersediaan pangan ini harus merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dan diadakan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pada kenyataannya, hak atas pangan masih belum terpenuhi secara merata di Indonesia. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, hingga akhir 2012, sebanyak 8 juta balita kekurangan gizi. Dengan jumlah ini Indonesia berada pada peringkat kelima negara dengan angka kekurangan gizi yang tertinggi di dunia (The Globe Journal, 2013). Sementara itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Introduction

As food is fundamental for human survival, its adequate provision is attached to the basic rights of humans. Indonesian Law No. 18 Year 2012 on Food states that food is human's most vital basic need and that its provision is a human right ensured in the Indonesian 1945 Constitution. As a human right, the availability, accessibility, as well as adequate provision and supply of quality and nutritionally balanced food—at the national, regional, and individual level—must be guaranteed by the government. Moreover, the availability of food must exist evenly throughout the country at all times by utilizing local resources, institutions, and culture.

In reality, the right to food has not been fulfilled equally throughout the country. According to the National Commission for the Protection of the Child, until late 2012, approximately 8 million children under five are undernourished, ranking Indonesia fifth among countries with the highest rate of undernourishment in the world (The Globe Journal, 2013). Moreover, the 2015 Food

Said Abdullah adalah Koordinator Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).



Said Abdullah is the coordinator of the Network of the People's Coalition for Food Sovereignty (KRKP).

Indonesia (WFP) 2015 menunjukkan bahwa 15% dari 398 kabupaten yang ada memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan (Kompas.com, 2015). Jumlah ini menurun dibandingkan 2005 yang mencapai 22% dari jumlah kabupaten (Kompas.com, 2015).

Kerawanan pangan ini terjadi karena adanya kegagalan dalam sistem produksi dan distribusi pangan sehingga kualitas konsumsi jauh dari memadai. Selain itu, produksi pangan utama, yaitu padi, jagung, kedelai, daging, dan gula, mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir (KRKP, 2012). Fluktuasi produksi menyebabkan rasio kebutuhan dan ketersediaan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, impor pangan terus meningkat. Statistik Makro Sektor Pertanian (2014) mencatat nilai impor pangan Indonesia pada 2012 mencapai puncaknya, yaitu menembus angka 8 miliar USD, dengan volume impor 18,2 juta ton. Pada kurun 2009–2013, nilai dan volume impor pangan Indonesia tumbuh sekitar 32,7% dan 22,9% per tahun. Pada sisi lain, sistem distribusi pangan yang dikendalikan korporasi melalui mekanisme pasar makin tidak adil. Kelaparan lebih sering disebabkan oleh distribusi pangan yang tidak merata yang menyebabkan sebagian masyarakat kelaparan (Witoto, 2012).

Pendekatan Kedaulatan Pangan

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melihat bahwa pendekatan kedaulatan pangan merupakan alternatif solusi bagi kondisi di atas. Dengan pendekatan ini, kedaulatan pangan dibangun melalui penguatan sistem pangan komunitas di tingkat lokal dan daerah agar lebih tahan atau lentur terhadap gejolak harga pangan. Istilah sistem pangan komunitas atau lumbung diartikan sebagai sistem pangan dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi pangan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh suatu masyarakat di suatu lokasi geografis tertentu untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, dan gizi masyarakat setempat.

Melalui sistem pangan komunitas, pemenuhan pangan dilakukan dengan memberikan pilihan yang leluasa kepada komunitas lokal yang secara partisipatoris membuat kebijakannya sendiri dalam mengelola produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangannya. Secara umum, bentuk sistem pangan komunitas yang berkembang di masyarakat adalah lumbung. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki kendali atas pangan sehingga pemenuhannya bukan saja terjamin, tetapi juga berkelanjutan.

Solidaritas Mewujudkan Kedaulatan Pangan

KRKP mendorong perubahan kebijakan, paradigma, serta pola pembangunan pertanian dan pangan yang mendukung pengembangan sistem pangan komunitas dalam bentuk lumbung dan yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan. Untuk ini, dilakukan advokasi di level provinsi, kabupaten, dan desa. Salah satu lokasi kegiatan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu di Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah

Resilience and Vulnerability Map of Indonesia shows that 15% out of 398 kabupaten has a high vulnerability rate of food insecurity (Kompas.com, 2015). This figure is less compared to 2005 which reached 22% out of all the kabupaten (Kompas.com, 2015).

The insecurity is due to a failure in the food production and distribution system, creating an inadequate quality of consumption. In addition, the production of staple food, i.e., rice, corn, soybean, meat, and sugar, has fluctuated in the last five years (KRKP, 2012). This has resulted in the imbalance of the supply and demand ratio. As a consequence, food import increases. The Agricultural Sector Macro Statistics (2014) recorded that in 2012 Indonesia's food import had reached its peak, which is USD8 billion with a volume of 18.2 million metric tons. During the period of 2009–2013, Indonesia's food import grew 32.7% and 22.9% per year. On the other hand, the food distribution system which is controlled by the corporate world through market mechanisms is creating more inequity. Hunger is more often caused by unequal food distribution which affects part of the population (Witoto, 2012).

The Food Sovereignty Approach

The People's Coalition for Food Sovereignty (KRKP) sees food sovereignty as an answer to the problems above. By using this approach, food sovereignty is developed through the strengthening of the community food system at the local and regional level so that it is more resilient toward food price spike. The term community food system or "barn" is defined as a food system in which food production, processing, distribution, and consumption are integrated to enhance the environmental, economic, social, and nutritional health of a particular area.

Through the community food system, food provision and supply is ensured by offering a range of alternatives to the community which will, in a participatory manner, determine how they will manage production, storage, distribution, and consumption of food. The barn is a form of community food system generally found in many communities. It allows communities to have control over their own food, ensuring its sustainable provision and supply.

Solidarity for Food Sovereignty

The KRKP encourages changes in policies, paradigm, and development patterns of food and agriculture which will support the development of a community food system in the form of a barn that relies on potentially sustainable local resources. For this purpose, advocacy is undertaken at the provincial, kabupaten, and village levels. These areas include Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, and Kabupaten Flores Timur in the Province of East Nusa Tenggara (NTT). The community food system

Kedaulatan pangan bisa dibangun melalui penguatan sistem pangan komunitas di tingkat lokal dan daerah.

Food sovereignty can be developed through the strengthening of the community food system at the local and regional level.



<http://kedaulatanpangan.net/2011/12/foto/>

Utara, dan Flores Timur. Pengembangan sistem pangan komunitas tersebut didorong melalui proses kesadaran, solidaritas, dan kerja sama antarwarga masyarakat guna mendukung kemampuan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hidupnya.

Bersama organisasi nonpemerintah (ornop) jaringan, sejak 2008 KRKP melakukan advokasi dengan membuat program kolaborasi antara pemerintah daerah (dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan), masyarakat, dan ornop setempat. Program yang digagas itu adalah Desa Mandiri Pangan menuju Desa Sejahtera (DMPDS). DMPDS merupakan modifikasi dari Program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Dalam program ini, telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi lokal dalam hal pendekatan dan panduan serta implementasinya. Untuk program ini, pemerintah menyediakan dana stimulus dan fasilitasi pelaksanaan program, sementara ornop menyediakan fasilitator dan dana pendukungnya.

Dampak advokasi kebijakan yang dihasilkan program ini adalah adanya upaya sinergi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lokasi kegiatan. Masing-masing SKPD berkontribusi pada satu tujuan bersama, yaitu peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa telah mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) No. 130 Tahun 2009 tentang Pengembangan Pangan Lokal (Gerakan Pengembangan Hilu Liwanya) dengan mengeluarkan peraturan desa (perdes) tentang pengembangan pangan lokal yang mewajibkan masyarakat untuk membudidayakan minimal 20 jenis tanaman pangan lokal.

Saat ini, konsep kedaulatan pangan belum sepenuhnya diadopsi oleh Undang-Undang Pangan No 18 Tahun 2012, tetapi kedaulatan pangan telah menjadi bagian penting di dalamnya. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang "sedikit" bernuansa kedaulatan ini, persoalan pangan dapat diatasi.

in this province is developed through awareness raising, solidarity, and cooperation among community members to strengthen their own capacity to access basic necessities.

In cooperation with a network of nongovernmental organizations (NGOs), since 2008 KRKP has engaged in advocacy work by developing program collaboration with the regional government (i.e., the Food Resilience Agency), civil society, and local NGOs. The program is called Desa Mandiri Pangan menuju Desa Sejahtera (DMPDS)¹. DMPDS is a modification of an earlier program called Desa Mandiri Pangan (meaning food sovereign village, usually referred to by its acronym, Demapan). In this new program, adjustments to local conditions have been made in terms of approaches, guidelines, and implementation. For this program the government provides a stimulus fund and facilities for program implementation, while NGOs provide facilitators and funding support.

The policy impact of this program is the development of a good co-working synergy across regional government task forces (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) in the program areas. Each SKPD works to achieve the same objective, that is, to increase the food resilience and autonomy of the people. In addition, the village government has adopted Local Government Regulation (Perda) No. 130 Year 2009 on the Development of Local Food Sufficiency (Movement for the Development of Hilu Liwanya) by issuing a village regulation (perdes) on the development of local food sufficiency by making it compulsory for the community to preserve at least 20 different types of local crops.

To date, the concept of food sovereignty has not been fully adopted in Law No. 18 Year 2012 on Food, although it has been an important element within the law. The presence of a law that somewhat contains the idea of sovereignty is expected to provide solutions to problems regarding food sufficiency.

¹ A literal translation of the name of the program would be "building a food sovereign village in order to move toward achieving a prosper village".

Tantangan ke Depan

Pada level masyarakat, dampak program terlihat dari ketersediaan pangan yang meningkat. Masyarakat juga telah memiliki cadangan pangan di lumbung desa yang dikelola secara swadaya oleh tim pangan desa (TPD). Namun, perubahan paling signifikan yang dihasilkan program ini adalah sikap masyarakat yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berdaulat dan dengan menggunakan tangan sendiri dan potensi lokal, mereka dapat lepas dari ancaman kelaparan.

Meskipun demikian, kemandirian dan keberlanjutan program masih menjadi tantangan besar. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan kepastian sekuensi, sementara keberlanjutan program dapat diambil alih oleh masyarakat dengan cara menginternalisasi dan mentransformasi program yang “datang dari luar” menjadi kebutuhan warga melalui pematangan dan kemandirian kelembagaan yang sudah ada. Selain itu, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang mendukung upaya pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat. ●

Daftar Acuan

- Kompas.com. WFP: 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan Rabu, 8 Juli 2015 [dalam jaringan] <<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/08/12523501/WFP.15.Persen.dari.398.Kabupaten.Masih.Rawan.Pangan>> [14 September 2015].
- KRKP (2012) *Booklet Data dan Fakta Situasi Pangan Indonesia 2012*. Bogor: KRKP.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2014) *Statistik Makro Sektor Pertanian 4 (2)*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- The Globe Journal (2013) *Delapan Juta Balita Indonesia Alami Gizi Buruk* [dalam jaringan] <<http://theglobejournal.com/kesehatan/delapan-juta-balita-indonesia-alami-gizi-buruk/index.php>> [21 Mei 2013].
- WFO (2009) *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, dan World Food Organization.
- Witoro (2012) ‘Membangun Kedaulatan Pangan Melalui Sistem Pangan Komunitas.’ Makalah yang dipresentasikan dalam seminar Hari Pangan Sedunia, Bogor.

Future Challenges

At the community level, the impact of the program is visible from the increase of food provision. The community also has a food reserve at the village barn which is managed independently by the village food team (TPD). The most significant change brought about by this program is the attitude of the community members. These people now believe in their strength to achieve sovereignty and they believe that by doing it themselves and by using local potentials, they will be able to free themselves from the threat of hunger.

Nevertheless, the independency and sustainability of the program remains a big challenge. To overcome these challenges calls for sequential certainty. To ensure program sustainability community members can take over by internalizing and transforming a program that was designed by people outside their community and turn it into something that their own people think is essential. This is achieved through the growth and autonomy of existing institutions. In addition, there is a need to create a policy environment that supports the goal of achieving community food autonomy and sovereignty. ●

List of References

- Kompas.com. WFP: 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan Rabu, 8 Juli 2015 [15% Out of 398 Kabupaten still Experience Food Insecurity] [online] <<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/08/12523501/WFP.15.Persen.dari.398.Kabupaten.Masih.Rawan.Pangan>> [14 September 2015].
- KRKP (2012) *Booklet Data dan Fakta Situasi Pangan Indonesia 2012 [Data and Fact of the food Situation in Indonesia]*. Bogor: KRKP.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2014) *Statistik Makro Sektor Pertanian 4 (2)* [Macrostatistics for the Agricultural Sector]. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- The Globe Journal (2013) *Delapan Juta Balita Indonesia Alami Gizi Buruk* [Eight Million Under-fives in Indonesia Experience Malnutrition] [online] <<http://theglobejournal.com/kesehatan/delapan-juta-balita-indonesia-alami-gizi-buruk/index.php>> [21 May 2013].
- WFO (2009) *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009*. [Map of Food Security and Vulnerability in Indonesia] Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, dan World Food Organization.
- Witoro (2012) ‘Membangun Kedaulatan Pangan Melalui Sistem Pangan Komunitas’ [Building Food Security through Community Food System]. Paper presented at the Hari Pangan Sedunia (World Food Day) seminar, Bogor.

